

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah Yang Diajak Kerjasama

Pada pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahannya. Kebijakan otonomi daerah yang efektif akan meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Kebijakan otonomi daerah mendorong berkembangnya kerja sama antar daerah.

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik dengan memfungsikan kewenangan daerah dalam kerja sama daerah. Untuk mengoptimalkan potensi pemerintah, kerja sama daerah telah menjadi salah satu alternatif yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Kerja sama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi suatu potensial pembangunan yang saling menguntungkan.

Pelaksanaan kerja sama daerah meliputi kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, kerja sama antar Pemerintah Daerah dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

a) KERJASAMA DKI JAKARTA DENGAN BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI dan CIANJUR (BODETABEKJUR)

1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur

Dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah di wilayah Bodetabekjur, setiap tahun dialokasikan anggaran Bantuan Keuangan diantaranya untuk harmonisasi antar kawasan dan kepentingan pembangunan Provinsi DKI Jakarta (keterpaduan, keserasian dan keseimbangan), seperti untuk mengurangi banjir, meningkatkan laju pergerakan orang dan barang, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan sebesar Rp. 346.986.146.000 untuk pemerintah kabupaten/ kota di wilayah Bodetabekjur, dengan perincian sebagaimana tabel VI.1.

Tabel 6.1
Alokasi Bantuan Keuangan per
Kota/Kabupaten Tahun 2017

No.	Kab/Kota	Alokasi Bantuan Keuangan (dalam milyar rupiah)		Realisasi Bantuan Keuangan 2017
		2016	2017	
1.	Kabupaten Bogor	5,46	5,628	5.628.470.000
2.	Kota Bogor	-	-	-
3.	Kota Depok	-	3,00	3.000.000.000
4.	Kabupaten Tangerang	-	-	-
5.	Kota Tangerang	15,20	15,00	15.000.000.000
6.	Kota Tangerang Selatan	-	3,00	0 (Tidak mencairkan)

7.	Kabupaten Bekasi	-	2,335	2.335.000.000
8.	Kota Bekasi	186,00	318,023	316.525.076.000
9.	Kabupaten Cianjur	6,45	-	-

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2017

Alokasi Bantuan Keuangan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada kabupaten/ kota di wilayah Bodetabekjur yakni:

1) Kabupaten Bogor

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Revitalisasi Gedung Puskesmas Poned Cileungsi
- b) Pengadaan Sarana Sanitasi Masyarakat di Kawasan Puncak
- c) Pengadaan Sarana Sanitasi Masyarakat di Kawasan Cileungsi

2) Kota Tangerang

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Pembangunan Trash Rake dan Penataan Bantaran Kali Mookervart

3) Kota Bekasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Pembangunan dan Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatiwaringin Raya
- b) Pembangunan Flyover Rawa Panjang
- c) Pembangunan Flyover Cipendawa
- d) Pemberian dana Community Development (CD)

4) Kota Depok

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Pembangunan dan Pelebaran Jalan Limo-Cinere

5) Kota Tangerang Selatan

Untuk Kota Tangerang Selatan tidak

melakukan pencairan bantuan keuangan dikarenakan pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana prasarana pendukung terminal BSD untuk mendukung akses Bus PPD rute Ciputat-BSD-Kota Tangerang-DKI Jakarta telah dilakukan melalui APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.

2) Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan sejak tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek) telah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensimplikasikan program/kegiatan kerjasama pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

Kerja sama pembangunan ini telah berkembang pesat, kelembagaannya telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kerja sama di wilayah Jabodetabekjur, dalam aturan kelembagaan kerja sama BKSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan memberi kontribusi dana untuk pembiayaan operasional sekretariat. Kontribusi dimaksud sesuai ketentuan diberikan dalam bentuk bantuan hibah yang digunakan untuk kegiatan operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama di wilayah Jabodetabekjur.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada APBD TA. 2017, dimana BKSP Jabodetabekjur mendapat alokasi bantuan hibah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), namun pelaksanaan pencairan belanja hibah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya kewenangan BPKD Provinsi DKI Jakarta dan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian menurut pemahanan BPKD Provinsi DKI Jakarta berkas pencairan hibah Sekretariat BKSP Jabodetabekjur tersebut dikembalikan melalui surat Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 967/-1.711.314 tanggal 19 Mei 2017 perihal pengembalian berkas bantuan hibah BKSP Jabodetabekjur pada APBD TA. 2017. Ini sesuai dengan Surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian dimana Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain menentukan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat (PLT dan PLH) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran sehingga hibah untuk Sekretariat BKSP Jabodetabekjur tidak dapat dicairkan.

Adapun rincian Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BKSP Jabodetabekjur adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.

**Bantuan Hibah Operasional Sekretariat BKSP
Jabodetabekjur Tahun 2012-2017**

Tahun	Alokasi Hibah
2012	1.500.000.000,00
2013	3.100.000.000,00
2014	2.000.000.000,00
2015	2.000.000.000,00
2016	750.000.000,00
2017	-

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Prov. DKI Jakarta, 2017

- Tidak ada pemberian hibah dikarenakan jabatan sekretaris BKSP masih dijabat oleh Pelaksana Harian.

Ruang lingkup Kerja sama BKSP Jabodetabekjur :

- 1) Penataan ruang
- 2) Permukiman, sarana dan prasarana
- 3) Sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup
- 4) Transportasi, perhubungan dan pariwisata
- 5) Agribisnis, koperasi dan usaha kecil menengah
- 6) Industri, perdagangan, pertambangan dan investasi
- 7) Kependudukan, ketentraman dan ketertiban
- 8) Kesehatan dan pendidikan
- 9) Sosial dan tenaga kerja

Tugas pokok Sekretariat BKSP Jabodetabekjur adalah menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan, kebijakan pelaksanaan, analisa evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP Jabodetabekjur. Sedangkan fungsi BKSP Jabodetabekjur adalah:

- 1) Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan bersama pembangunan Jabodetabekjur
- 2) Pelaksanaan penyusunan program pembangunan bersama Jabodetabekjur
- 3) Pelaksanaan pembangunan bersama Jabodetabekjur
- 4) Pelaksanaan evaluasi program pembangunan bersama Jabodetabekjur

Adapun tugas pokok Sekretariat BKSP Jabodetabekjur adalah menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan, kebijakan pelaksanaan, analisa evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP Jabodetabekjur.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup kegiatan kerjasama BKSP dan Sekretariatnya, maka pelaksanaan kegiatan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur selama Tahun Anggaran 2017 adalah:

- 1) Peningkatan kerja sama bidang pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur, antara lain :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang tata ruang dan pertanahan di Wilayah Jabodetabekjur
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang sumber daya air dan lingkungan hidup di Wilayah Jabodetabekjur
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang pemukiman dan sarana dan prasarana di Wilayah Jabodetabekjur
- 2) Peningkatan kerja sama bidang perekonomian di Wilayah Jabodetabekjur, antara lain :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang agribisnis, koperasi dan UMKM di Wilayah Jabodetabekjur
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang transportasi dan perhubungan di Wilayah Jabodetabekjur
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja

sama pembangunan dan monev bidang industri, perdagangan, pertambangan dan investasi di Wilayah Jabodetabekjur

- 3) Peningkatan kerja sama bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di Wilayah Jabodetabekjur
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang kependudukan, ketentraman dan ketertiban di Wilayah Jabodetabekjur
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang kesehatan dan pendidikan di Wilayah Jabodetabekjur
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang sosial dan tenaga kerja di Wilayah Jabodetabekjur
- 4) Peningkatan kerja sama bidang umum dan penyelenggaraan operasional pendukung tugas Sekretariat BKSP Jabodetabekjur

Pada Tahun 2017 hingga saat ini, BKSP Jabodetabekjur dan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Kepala Daerah Jabodetabekjur, antara lain :

- 1) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangsel, Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi Nomor Nomor: HK.201/1/11/BPTJ-2017, Nomor: 5 Tahun 2017, Nomor: 550/1245/DISHUB/2017, Nomor: 550/MoU.9.Huk/2017, Nomor: 119/KK.19-Dishub/2017, Nomor: 119/110/KB/KS/VI/2017, Nomor: 050/23/Pem-Dishub/Huk/2017, Nomor: 550/103-Dishub/2017, Nomor: 415.4/3854/ksd/2017, Nomor: 134.43/1554-Dishub/2017,

Nomor: 759.A Tahun 2017, Nomor: 551/MoU.01.Dishub/2017, tanggal 15 Juni 2017;

- 2) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 539/75/SPIBUMD dan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017 tentang Pembagian Besaran Participating Interest (Pi) 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Offshore North West Java;
- 3) Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor 188.600/MOU.6.HUK/2017 dan Nomor 415.4/3023_KSD/2017, tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 4) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 119/146/BKSP dan Nomor 435 Tahun 2016, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten;
- 5) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 1883600/MOU.7-HUK/2017 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Provinsi Banten;
- 6) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2017, Nomor 188.600/MOU.6.HUK/2017 tanggal 23 Agustus 2018

tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

- 7) Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 224 Tahun 2017, tanggal 24 April 2017 tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi.

b) KERJA SAMA PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PROVINSI SE JAWA-BALI

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbang Reg) Jawa-Bali Tahun 2017 dilaksanakan di Karanganyar, Jawa Tengah dan dihadiri oleh 7 Provinsi seJawa-Bali, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Tema Musrenbang Regional Jawa-Bali Tahun 2017 adalah “Menjawab Peluang Bonus Demografi Melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Musrenbang Regional se-Jawa-Bali Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. peningkatan kualitas pendidikan;
- c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- d. pengendalian dampak lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- e. pengendalian jumlah penduduk.

Pada Musrenbang Regional se-Jawa-Bali tersebut direkomendasikan perlunya upaya-upaya strategi di Wilayah Jawa dan Bali, sebagai berikut:

a. Strategi Urusan Pendidikan

1. mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan;
2. meningkatkan penataan kelembagaan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional serta memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi;
3. memperluas penyediaan sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau standar internasional bagi lulusan pendidikan vokasi;
4. meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;
5. memastikan kemudahan memperoleh akses teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan;
6. meningkatkan praktek pendidikan inklusi;

b. Strategi Urusan Ketenagakerjaan

1. memperluas skala ekonomi wilayah melalui pengembangan industri padat karya dalam memperluas lapangan kerja;
2. mengembangkan industri kecil dan menengah melalui kebijakan pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk, dan fasilitasi pasar;
3. mengembangkan wirausaha;
4. afirmasi kebijakan untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal;
5. mengembangkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui BUMD dan/atau koperasi.

c. Strategi Urusan Penyederhanaan Perizinan

1. meningkatkan kemudahan investasi meliputi perizinan satu pintu, waktu dan prosedur perizinan;
2. mempermudah akses pembiayaan afirmatif untuk PMDN non fasilitas;
3. kebijakan tata ruang yang membuka ruang untuk investasi;

4. mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri;
- d. Strategi Urusan Lingkungan Hidup : meningkatkan akses prasarana dan sarana dasar (rumah, air bersih, sanitasi) bagi masyarakat perkotaan (mendukung percepatan program 100-0-100);
- e. Strategi Urusan Pengendalian Penduduk: langkah penguatan kebijakan pengendalian penduduk melalui meningkatkan cakupan pelayanan KB serta meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi untuk penduduk usia produktif.

c) KERJA SAMA MULTILATERAL MITRA PRAJA UTAMA (MPU)

Kerja sama antar pemerintah provinsi dalam lingkup Mitra Praja Utama meliputi 10 Provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, JawaTimur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan MPU adalah mensinergikan sumber daya alam, potensi dan peluang ekonomi, potensi SDM dan Sumber Daya Non Alami, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah serta berbagai masalah yang dianggap penting sesuai bidang kerjasama.

Beberapa kegiatan MPU selama tahun 2017 yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- I. Rapat Gabungan (RAGAB) FKD-MPU ke XVII Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 April 2017 bertempat di Hotel Allium, Tangerang Banten.
- II. Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) FKD-MPU Tahun 2017 yang dilaksanakan pada Tanggal 18 s.d 20 Oktober 2017 bertempat di Hotel Lombok Raya, Lombok, NTB.
- III. Workshop Sistem & Aplikasi MPU Tourism, Trade & Investment (TTI) Centre yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 November 2017 di Hotel Pandanaran, Semarang.

- IV. Workshop Pemetaan Investasi untuk mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi anggota MPU, yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Desember 2017 di Hotel Novotel, Lampung.
- V. Rapat Khusus MPU tentang Perencanaan Program Kerjasama FKD-MPU Tahun 2018 dan Persiapan Rakergub FKD-MPU ke XVIII Tahun 2018 di Provinsi Lampung. Rapat Khusus ini dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Desember 2017 bertempat di Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta.
- VI. Rapat Khusus MPU tentang Perencanaan Program Kerjasama FKD-MPU Tahun 2018 dan Ptindak Lanjut Persiapan Rakergub FKD-MPU ke XVIII Tahun 2018 di Provinsi Lampung. Rapat Khusus ini dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Desember 2017 bertempat di Hotel Grand Aquila, Bandung.

d) KERJASAMA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten lain dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan produksi baru di daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi. Untuk tahun 2017 belum ada PKS Transmigrasi yang ditandatangani dikarenakan keterbatasan akses untuk pembahasan.

Pada tahun 2017 menghasilkan 1 Perjanjian Kerja Sama yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3349/-072.26 dan Nomor 120.23/1/4.1.3.1/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi untuk Penyediaan Daging Sapi bagi Kebutuhan Bangka Barat dan Provinsi DKI Jakarta serta beberapa Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU). Pada Tahun

2017 kerjasama dimaksud dituangkan dalam 3 Keputusan Bersama, sebagai berikut:

- a. Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 74/SK/MPU/2017 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur dan Rapat Gabungan Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2019-2023;
- b. Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 75/SK/MPU/2017 tentang Program dan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Tahun 2018;
- c. Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 76/SK/MPU/2017 tentang Rekomendasi kepada Pemerintah;

2. Dasar Hukum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang kerja sama antar daerah itu terwadahi di dalam pasal 363, 364, 365, 366, 367, 368, 36 dan 370 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa :

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga;
3. Kerja sama dengan Daerah lain, dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela;
4. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

5. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan kerja sama terdapat perubahan, namun sayangnya dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis untuk mengatur sistem, tata kelola dan pengaturan mengenai proses pelaksanaan kerja sama antar daerah. Oleh karenanya pelaksanaan kerja sama daerah masih mengacu kepada aturan sebelumnya dan peraturan teknisnya masih menggunakan ketentuan yang lama yakni :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.
- e. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pola Kerja Sama Daerah.
- f. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1903/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tabel 6.3
Produk hukum kerja sama daerah

Kesepakatan Bersama

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDA TANGANI	TANGGAL PENANDA TANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	MASA BERLAKU
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Addendum Kesepakatan Bersama Nomor 04/PKS/M/2017 dan Nomor 1 Tahun 2017	06-Mar-17	Penyelenggaraan Rumah Susun Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Relokasi Permukiman Kumuh Sepanjang Daerah Aliran Sungai untuk Mendukung Penataan dan Normalisasi Sungai Ciliwung	2 Tahun
2	Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kesepakatan Bersama Nomor HK.01.01-Dc/367 dan Nomor 3 Tahun 2017	03/04/2017	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	12 bulan
3	Universitas Pertahanan Indonesia	Kesepakatan Bersama Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 85/KB/UNHAN/IV/2017	13/04/2017	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1 tahun
4	PT Rekso Nasional Food	Kesepakatan Bersama Nomor 28 TAHUN 2017	13-Apr-17	Revitalisasi Sarana Olahraga dan Taman Bermain Anak di Lapangan Banteng	3 bulan
5	Kepolisian Daerah Metro Jaya	Kesepakatan Bersama Nomor 2035/-072 dan Nomor MOU/01/IV/2017	27-Apr-17	Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
6	Lembaga Sandi Negara	Kesepakatan Bersama Nomor 14/LSN/SU/KH.02.01/04/2017 dan Nomor 5 Tahun 2017	28/04/2017	Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 tahun
7	Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata	Kesepakatan Bersama Nomor HK.01.01-Dc/569 dan Nomor KB.95/KS.001/DP DIP/KEMPAR/2017 dan Nomor 4 Tahun 2017	29-Mei-17	Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Permukiman dalam Rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu dan Sekitarnya	1 Tahun
8	Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata	Kesepakatan Bersama Nomor HK.01.01-Dc/569 dan Nomor KB.95/KS.001/DP DIP/KEMPAR/2017 dan Nomor 4 Tahun 2017	29/05/2017	Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Pemukiman Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu dan Sekitarnya	12 bulan
9	Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kesepakatan Bersama	31/05/2017	Penanganan Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara Terkait Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	
10	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Kesepakatan Bersama Nomor 018/05/2017 dan Nomor 6 Tahun 2017	31/05/2017	Pemanfaatan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Untuk Mendukung Pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	12 bulan
11	Kementerian Perhubungan	Kesepakatan Bersama	15/06/2017	Rencana Induk Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDA TANGANI	TANGGAL PENANDA TANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	MASA BERLAKU
12	Universitas Gadjah Mada	Kesepakatan Bersama Nomor 10 Tahun 2017 dan Nomor 1835/P/Dir-KA/2017	20/06/2017	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	1 tahun
13	Universitas Indonesia	Kesepakatan Bersama Nomor 8 Tahun 2017 dan Nomor 43/NKB/R/UI/2017	20/06/2017	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	1 tahun
14	Komando Lintas Laut Militer	Kesepakatan Bersama Nomor 9788/-1.793.43 dan Nomor 459a/VII/2017	27/07/2017	Penggunaan Danau Sunter Untuk Latihan Bersama Olah Raga Air	12 bulan
15	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, PT Railink	Kesepakatan Bersama Nomor H.201/1/10/BPTJ-2017 dan Nomor 13 Tahun 2017 dan Nomor 72/AA.005/DU-2017 dan Nomor 09/Sekr/MOU/IX/2017 dan Nomor PT.KCJ:130/HK-UM/KCJ/IX/2017 dan Nomor 001/UT2000/105/I X/2017 dan Nomor 2850/PJ-PT.TJ/IX/2017 dan Nomor MOU/012/MRT/IX/2017 dan Nomor RL/DIR/MOU/050/I X/2017	06-Sep-17	Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Transportasi Antar Moda di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	1 Tahun
16	Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri RI, PT Jasa Raharja (Persero) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Pembangunan Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah DI Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, PT BCA Tbk,	Kesepakatan Bersama	07/09/2017	Layanan Samsat Online Nasional Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengesahan STNK pada Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali	3 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDA TANGANI	TANGGAL PENANDA TANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	MASA BERLAKU
	PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk				
17	Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional	Kesepakatan Bersama Nomor 12 Tahun 2017 dan Nomor DIRUT/1163/IX/2017	08/09/2017	Dukungan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Bentuk Pembelian Rumah Susun Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Dibangun Oleh Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional	12 bulan
18	Kepolisian Daerah Metro Jaya	Kesepakatan Bersama Nomor B/MoU-09/IX/2017/Datro dan Nomor 14 Tahun 2017	13/09/2017	Pembinaan Terhadap Calon Peserta Penerimaan Anggota Polri di Polres Jajaran Polda Metro Jaya Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1 tahun
19	Badan Ekonomi Kreatif	Kesepakatan Bersama Nomor 99/NK/Bekraf/X/2017 dan Nomor 27 Tahun 2017	02-Okt-17	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun
20	Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN, BKPM, Kepolisian Daerah Metro Jaya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Bank DKI, PT Jasa Raharja (Persero), PT PLN Persero	Kesepakatan Bersama	10-Okt-17	Mal Pelayanan Publik	1 Tahun
21	Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional	Berita Acara Kesepakatan Nomor 25 Tahun 2017 dan Nomor DIRUT/1330/10/X/2017	13-Okt-17	Penunjukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sebagai Pengawas dalam Penyelesaian Biaya Investasi Rusunawa Sindang Koja	1 Tahun
22	Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila	Kesepakatan Bersama Nomor 007/MoU/UKP/09/2017 dan Nomor 15 Tahun 2017	19/09/2017	Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi DKI Jakarta	12 bulan
23	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Kesepakatan Bersama Nomor 80/KB/BPPT-DKI JAKARTA/12/2017 dan Nomor 33 TAHUN 2017	20-Des-17	Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	1 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDATANGANI	TANGGAL PENANDAT ANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	MASA BERLAKU
1.	PT Global Infotech Solution	Perjanjian Kerjasama Nomor 824/-072	03/03/2017	Pemanfaatan IBM Server dan Aplikasi Lumen Helpdesk	5 tahun
2.	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Perjanjian Kerjasama Nomor B-89/C/03/2017 dan Nomor 2 Tahun 2017	06/03/2017	Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa	3 bulan
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Perjanjian Kerjasama Nomor 02/PKS/Dr/2017 dan Nomor 3 Tahun 2017	06/03/2017	Penyelenggaraan Rumah Susun Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Rangka Relokasi Masyarakat Sepanjang Daerah Aliran Sungai Untuk Mendukung Penataan dan Normalisasi Sungai Ciliwung	2 tahun
4.	Kejaksaan Republik Indonesia	Adendum Nomor B-88/C/03/2017 dan Nomor 1 Tahun 2017	06/03/2017	Pinjam Pakai Untuk Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, Bangunan, dan Prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa	5 tahun
5.	PT Evi Asia Tenggara	Perjanjian Kerjasama Nomor 012/IV/EXT/GOV/2017 dan Nomor 1268/-072	03/04/2017	Kerjasama Pengembangan Coworking Space	6 tahun
6.	Universitas Pertahanan	Perjanjian Kerjasama Nomor 2162/-084.41 dan Nomor 86/PKS/UNHAN/I V/2017	13/04/2017	Peningkatan Kompetensi Aparatur pada Bidang Pertahanan	5 tahun
7.	PT Pendawa Properti Indonesia	Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/-076 dan Nomor PPI/20170002/AC/04	13/04/2017	Penyediaan Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	2 tahun
8.	PT Triputra Argo Persada	Perjanjian Kerjasama Nomor 1903/-072 dan Nomor 124003/TAP/PER-CLE-HO/IV/17	15/04/2017	Penyediaan Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	3 tahun
9.	PT Tatalogam Lestari	Perjanjian Kerjasama Nomor 1197/-1.841 dan Nomor 473/04/2017/TTL	17/04/2017	Program Bedah Rumah di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	1 tahun
10.	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Perjanjian Kerja Sama Nomor 2480/1.834.2 dan Nomor PKSJSHK/051/PKS/BPM/IV/2017	18-Apr-17	Program Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja diluar Jam Kerja (Program JSHK)	5 Tahun
11.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	NOMOR : NOMOR : 04/SPK/La/2017	21-Apr-17	Penerapan Inovasi Teknologi Moving Bed Biofilm Reactor (Mbbr) Dalam Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Waduk Melati	3 Tahun
12.	Balai Sertifikasi Elektronik	Perjanjian Kerjasama Nomor 2981/072.5 dan Nomor 15/LSN/SU/KH.02.01/04/2017	28/04/2017	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	4 tahun

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDATANGANI	TANGGAL PENANDATANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	MASA BERLAKU
13.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Jakarta Barat	Perjanjian Kerjasama Nomor 180/KTR/IV-04/0517	28/04/2017	Akses Dalam Rangka Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan di Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	2 tahun
14.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Jakarta Selatan	Perjanjian Kerjasama Nomor 239/KTR/IV-02/0517	28/04/2017	Akses Dalam Rangka Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan di Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	2 tahun
15.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Jakarta Timur	Perjanjian Kerjasama	28/04/2017	Input Data Dalam Rangka Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan di Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	2 tahun
16.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Jakarta Pusat	Perjanjian Kerjasama Nomor 1197/-085.21 dan Nomor 255/KTR/IV-01/0517	28/04/2017	Akses Dalam Rangka Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan di Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	2 tahun
17.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jakarta Utara	Perjanjian Kerjasama	28/04/2017	Akses Dalam Rangka Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan di Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	2 tahun
18.	Universitas Pendidikan Ganesha	Perjanjian Kerjasama Nomor 5691/-072 dan Nomor 1855/UN 48/KM/2017	04-Mei-17	Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi DKI Jakarta	5 tahun
19.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perjanjian Kerjasama	05/05/2017	Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1 tahun
20.	PT Qlue Performa Indonesia	Perjanjian Kerjasama Nomor 1769/-072.1 dan Nomor 01.03032017.022/ PKS	05/05/2017	Pemanfaatan Aplikasi Qlue	1 tahun
21.	PT Terralogiq Integrasi Solusi	Perjanjian Kerjasama Nomor 1763/-072.1 dan Nomor 01.03032017.021/ PKS	05/05/2017	Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Aplikasi Qlue Nomor 511/-1.817.5 dan Nomor 01.27022015.35/PKS	1 tahun
22.	PT Tokopedia	Perjanjian Kerja Sama Nomor TKPD/LEGAL/V/2 017/008 dan Nomor 2001/-1.828	06-Mei-17	Laman Kota Jakarta	3 Tahun
23.	PT Propan Raya I.C.C.	Perjanjian Kerjasama Nomor 911 Tahun 2017	08/05/2017	Program Pelatihan Pengecatan Bagi Pekerja Kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1 tahun
24.	Politeknik Negeri Madiun	Perjanjian Kerjasama Nomor 5959/-072 dan Nomor 1399/PL33.001/D N/2017	09-Mei-17	Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi DKI Jakarta	5 tahun
25.	Universitas Sebelas Maret	Perjanjian Kerjasama Nomor 5916/-072 dan Nomor 22/UN27/KS/2017	09-Mei-17	Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi DKI Jakarta	5 tahun

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDATANGANI	TANGGAL PENANDAT ANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAKAN	MASA BERLAKU
26.	Universitas Bangka Belitung	Perjanjian Kerjasama Nomor 6423/-072 dan Nomor 1824/UN50/BW/2017	16-Mei-17	Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi DKI Jakarta	5 tahun
27.	Universitas Samudra	Perjanjian Kerjasama Nomor 6345/1.851.91 dan Nomor 06/UN54/DN/2017	16-Mei-17	Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi DKI Jakarta	5 tahun
28.	Fakultas Farmasi Universitas Pancasila	Perjanjian Kerjasama Nomor 6127/1.851.8 dan Nomor 244/FF-UP/PKS-/IV/2017	18/05/2017	Pelayanan dan Kajian Kesehatan Serta Pengabdian Masyarakat	6 tahun
29.	Universitas Padjajaran	Perjanjian Kerjasama Nomor 9122/-072 dan Nomor 186/UN6.WR3/PK S/2016	19-Mei-17	Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi DKI Jakarta	5 Tahun
30.	Plan International Indonesia	Perjanjian Kerjasama Nomor 2939/-076.97 dan Nomor 038/PKS/FY17/CO N/2017	24/05/2017	Revitalisasi Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Kelurahan Duri Utara	3 tahun
31.	PT Napindo Media Ashatama	Perjanjian Kerjasama Nomor 2082/-079.3 dan Nomor 052/DIR-NMA/05/2017	26/05/2017	Penyediaan Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kegiatan Pekan Raya Jakarta / Event Jakarta Fair 2017	3 tahun
32.	Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta	Perjanjian Kerjasama Nomor 2199/-072 dan Nomor B-436/BPS-DKI/31000/05/2017	31/05/2107	Penyediaan Data Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di DKI Jakarta	3 tahun
33.	PT Cemindo Gemilang	Perjanjian Kerjasama Nomor 1778/-1.84 dan Nomor 015/CG-PEMPROVDKI/2017	20/06/2017	Dukungan Pelaksanaan Program Bedah Rumah	1 tahun
34.	Yayasan Mitra Museum Jakarta	Perjanjian Kerjasama Nomor 2775/-1.853.35 dan Nomor YMMJ/2017-07/01	06/07/2017	Program Pengembangan Permuseuman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	5 tahun
35.	PT Nestle Indonesia	Perjanjian Kerja Sama Nomor 56 Tahun 2017 dan Nomor 120/Legal/DG/17	21-Jul-17	Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya "Milo Jakarta International 10K 2017"	31-Agust-17
36.	Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta	Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/06/VII/Ka/Rh. 01/2017/BNNP DKI dan Nomor 54 Tahun 2017	31-Jul-17	Dukungan Layanan Pascarehabilitasi	3 Tahun
37.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan	Perjanjian Kerjasama Nomor 1759 Tahun 2017 dan Nomor 022/MOU/STIKES -Bin/VIII/17	02/08/2017	Pelayanan dan Kajian Kesehatan Serta Pengabdian Masyarakat	3 tahun

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDATANGANI	TANGGAL PENANDAT ANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
38.	PT Rekso Nasional Food	Perjanjian Kerja Sama Nomor 55 Tahun 2017 dan Nomor 178/PKS-SKO/RNF/VIII/2017	10-Agust-17	Revitalisasi Sarana Olahraga dan Taman Bermain Anak di Lapangan Banteng	5 Tahun
39.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Perjanjian Kerjasama Nomor 4049/-072 dan Nomor 1017/III/LPPM-KJS.10.03/8/2017	11/08/2017	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Rumah Susun Muara Baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	3 tahun
40.	Yayasan Pembinaan Anak Cacat Jakarta	Perjanjian Kerja Sama Nomor 298/PKS-DKI/PEND/X/17	22-Agust-17	Peningkatan Kapasitas Pendidik bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Inklusi Provinsi DKI Jakarta	2 Tahun
41.	PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan PT Johnson & Johnson Indonesia	Perjanjian Kerja Sama Nomor 1848 Tahun 2017 dan Nomor SAT-DINKES-JNJ/CORCOM/ED UKASI KESEHATAN/VIII/2017/556	26-Agust-17	Edukasi Kesehatan Masyarakat	1 Tahun
42.	Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri RI, PT Jasa Raharja (Persero) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Pembangunan Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah DI Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, PT BCA Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perjanjian Kerja Sama	07-Sep-17	Layanan Samsat Online Nasional Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengesahan STNK pada Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali	3 Tahun
43.	PT Ghani Rekatama Mandiri	Perjanjian Kerjasama Nomor 4556/-072 dan Nomor 154/KS/EVT/IX/2017	07/09/2017	Penyelenggaraan Acara Peresmian 100 (Seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1 tahun
44.	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	Perjanjian Kerjasama Nomor 1882/-072.25 dan Nomor 1532/A.II 03/09/2017	18/09/2017	Program Aktualisasi Nilai-Nilai Agama di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta / Jakarta Islamic Center	2 bulan

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDATANGANI	TANGGAL PENANDAT ANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
45.	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	Perjanjian Kerjasama Nomor 2/-1.852.19 dan Nomor 1531/A.II..03/09/2017	18/09/2017	Program Aktualisasi Nilai-Nilai Agama di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'Ari	3 tahun
46.	PT Bumi Serpong Damai, Tbk	Perjanjian Kerjasama Nomor 39 Tahun 2017 dan Nomor 066/PTSS/HO/WA DIROP/IX/2017	19/09/2017	Pembangunan Masjid Al Mubarakah Taman Petak Kodok Jalan Tubagus Angke RT 06 RW 10 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat	6 bulan
47.	PT Garuda Indonesia (Persero)	Perjanjian Kerja Sama Nomor IG/PERJ/JKTAM-2024/2017		Sistem Pembelian Tiket Penerbangan Garuda Indonesia	27 September 2017 - 30 September 2018
48.	Badan Ekonomi Kreatif	Perjanjian Kerja Sama Nomor 100/PKS/Bekraf/X/2017 dan Nomor 53 Tahun 2017	02-Okt-17	Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Taman Ismail Marzuki	5 Tahun
49.	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	Perjanjian Kerja Sama Nomor 5094/-072 dan Nomor 92/SPJK-HK.04/X/2017	03-Okt-17	Penyediaan Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	1 Tahun
50.	Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan PT Bank DKI	Perjanjian Kerja Sama	4 Oktober 2017	Pelaksanaan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) Melalui Transaksi Elektronik Samsat (E-SAMSAT)	5 Tahun
51.	PT Impresi Perdana	Perjanjian Kerja Sama Nomor 5283/-072 dan Nomor PKS-IP/PemProvDKI/B D/III/IX/2017	13-Okt-17	Edukasi dan Penyediaan Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di 186 Ruang Publik Terbuka Ramah Anak	s.d. 31 Desember 2017
52.	PT Jakarta Propertindo	Perjanjian Kerja Sama Nomor 5282/-072 dan Nomor 001/UT2000/107/X/2017	13-Okt-17	Penyediaan Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	3 Tahun
53.	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk - Sekretariat DPRD	Perjanjian Kerja Sama Nomor 1376/075.33 dan Nomor IG/PERJ/JKTAM-2025/2017	19-Okt-17	Sistem Pembelian Tiket Penerbangan Garuda Indonesia	25 September 2017 - 30 September 2018
54.	PT Garuda Indonesia (Persero)	Perjanjian Kerja Sama Nomor 4436/-1.857 dan Nomor IG/PERJ/JKTAM-2023/2017	19-Okt-17	Sistem Pembelian Tiket Penerbangan Garuda Indonesia	26 September 2017 - 30 September 2018
55.	Akademi Keperawatan Manggala Husada	Perjanjian Kerja Sama Nomor 1840 Tahun 2017 dan Nomor 475/MH/AKP/MOU.XI/2017	01-Nop-17	Pelayanan dan Kajian Keperawatan serta Pengabdian Masyarakat	5 Tahun

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDATANGANI	TANGGAL PENANDAT ANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
56.	PT Inzpire Zupazuma	Perjanjian Kerja Sama Nomor 5339/-1.795.13 dan Nomor 069/PKS/IZZ/XI/2017	06-Nop-17	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Peningkatan Kualitas Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	6 Bulan
57.	Lembaga Sandi Negara	Perjanjian Kerja Sama Nomor 5092/072.5 dan 45/LSN/SU/KH.02.01/12/2017	19-Des-17	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Mendukung Pengelolaan dan Perlindungan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4 Tahun
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Perjanjian Kerja Sama	20 Desember 2017	Pengkajian, Pembangunan Teknologi Percontohan Pengolahan Sampah Secara Termal Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1 Tahun
59.	PT Sinar Sosro	Perjanjian Kerja Sama Nomor 371/-1.795.22		Pembangunan Pedestal Patung Menembus Batas di Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kalijodo	5 Tahun
60.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Perjanjian Kerjasama		Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh dan Teknologi Penerbangan dalam Rangka Mendukung Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3 tahun
61.	Yayasan Wahana Visi Indonesia	Perjanjian Kerjasama		Penyediaan Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jalan Raya Bekasi Timur Km. 18 Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur	1 tahun
62.	Rukun Warga 06 Kelurahan Cipinang Melayu Kompleks Perumahan TNI AD Jatiwaringin			Bina Lingkungan Bagi Warga Kompleks Perumahan Rukun Warga 06 Cipinang Melayu di SD Negeri Cipinang Melayu 03 dan 04 Pagi dan SMP Negeri 109 Jakarta	
63.	Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)			Bina Lingkungan bagi anak – anak anggota dan mantan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di SMA Negeri 93 Jakarta	
64.	Pusdikkes Kodiklat TNI Angkatan Darat			Bina Lingkungan bagi putera – puteri personal Pusdikkes Kodiklat TNI Angkatan Darat di SMP Negeri 281 Jakarta	
65.	Brigif I PAM Ibukota/Jaya Sakti			Bina Lingkungan bagi anak – anak Prajurit dan PNS Brigif I PAM Ibukota/Jaya Sakti di SD Negeri Pekayon 16 Pagi yang berdomisili di Pekayon Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	
66.	Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma			Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan Bina Lingkungan Bagi anak – anak Prajurit TNI Angkatan Udara di Sekolah – Sekolah yang berdomisili di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma	
67.	Batalyon Infanteri Mekanis 201/Jaya Yudha			Bina Lingkungan Bagi anak – anak Prajurit Batalyon Infanteri Mekanis 201/Jaya Yudha di SD di SD Negeri Pekayon 05, SD Negeri Pekayon 12 dan SMP Negeri 91 Jakarta yang berdomisili di Pekayon Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur	

NO	MITRA KERJASAMA	DOKUMEN YANG DITANDATANGANI	TANGGAL PENANDAT ANGANAN	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	MASA BERLAKU
68.	Perhimpunan Purnakaryawan Timah wilayah Jakarta dan Sekitarnya			Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra-Putri/Cucu Kandung Karyawan/Pensiunan Timah di Sekolah – Sekolah Negeri yang Berdomisili di Wilayah Komplek Timah Pangkalan Jati Baru/Cilandak	
69.	Komando Strategi Angkatan Darat Tanah Kusir Tanah Kusir			Bina Lingkungan Bagi Anak – Anak Prajurit dan PNS Kostrad Tanah Kusir di SMP Negeri 164 Kota Administrasi Jakarta Selatan	
70.	Komando Pasukan Khusus (Kopassus)			Bina Lingkungan Bagi anak – anak Prajurit dan PNS Kopassus di SMA Negeri 39, SMP Negeri 103, SD Negeri Baru 01 Pagi, SD Negeri Baru 02 Pagi, SD Negeri 07 Pagi dan SD Negeri Cijantung 03 Pagi Yang Berdomisili di Cijantung Kota Administrasi Jakarta Timur	
71.	Komplek Perwira Angkatan Darat (KPAD) Bulak Rantai			Bina Lingkungan Bagi Warga Komplek Angkatan Darat (KPAD) Bulak Rantai di SMP Negeri 20 Jakarta	
72.	Batalyon Kaveleri -1/1Kostrad dan Brigif Linud 17/1 Kostrad			Bina Lingkungan Bagi anak – anak Prajurit dan PNS Batalyon Kaveleri - 1/1Kostrad dan Brigif Linud 17/1 Kostrad di SD Negeri Kalisari 03 Pagi dan SD Negeri 06 Petang	
73.	Direktorat Perhubungan Angkatan Darat			Bina Lingkungan Bagi anak – anak Prajurit, PNS dan Purnawirawan Direktorat Perhubungan Angkatan Darat di SDSN Kalisari 02 Pagi yang berdomisili di Komplek Hubad Cijantung Kota Administrasi Jakarta Utara	
74.	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III			Bina Lingkungan Bagi anak – anak Prajurit dan PNS Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III di SD Negeri Kelapa Gading Barat 01 yang berdomisili di Kelapa Gading Barat Kota Administrasi Jakarta Utara	
75.	Komplek Perwira Angkatan Darat (KPAD) Sederhana Cijantung II			Bina Lingkungan Bagi warga Komplek Perwira Angkatan Darat (KPAD) Sederhana Cijantung II di SMP Negeri 102 Jakarta	
76.	Rukun Warga 005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara			Penyelenggaraan Pendidikan Bina Lingkungan bagi putra – putri Warga 005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara di SMP Negeri 289 Jakarta	

Sumber : Biro Tata Pemerintahan 2017

Dalam rangka implementasi kerjasama antar daerah sesuai dengan tata cara kerjasama daerah, kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek kerjasama yang disepakati. Apabila menyetujui rencana kerjasama tersebut, para pihak dapat meningkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama/MoU

dan ditindaklanjuti dengan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama.

3. Bidang Kerjasama

Kerjasama antar daerah Dalam Negeri meliputi berbagai bidang antara lain sebagaimana tampak pada tabel 5.3.

Tabel 6.4
Bidang Kerjasama DKI Jakarta dengan Daerah Lain

NO.	MITRA	JUDUL KERJA SAMA	TANGGAL	NOMOR KERJASAMA	SKPD PELAKSANA
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemkab Kapuas	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah	10/08/2012 (Jangka waktu cc bl5 tahun)	No. 18 Tahun 2012 ; No. 10/KB-KSD/KT6/2012; dan No. 475.1/72/DISTRAN.2012	Disnakertrans
2.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemkab Muna	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara	10/08/2012 (Jangka waktu 5 tahun)	No. 19 Tahun 2012 ; No. 37 Tahun 2012; dan No. 475.1/2136	Disnakertrans
3.	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu	10/09/2012 (Jangka waktu 5 tahun)	No. 57761/-1.896 dan No.180/20/415.4/2012	Disnakertrans
4.	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi Kawasan Permukiman Transmigrasi Liandok SP.3 Kec. Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan	18/10/2013 (Jangka waktu 5 tahun)	No. 24 Tahun 2013	Disnakertrans
5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Tanah Abang,Kec. Muara Kuang Kabupaten Kepahiang	27/09/2013 (Jangka waktu 5 tahun)	No. 20 Tahun 2013	Disnakertrans

		Provinsi Bengkulu			
6.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemkab Konawe Utara	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Bengkulu	27/09/2013 (Jangka waktu 5 tahun)	No. 19 Tahun 2013	Disnakertrans
7.	Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	27/09/2013 (Jangka waktu 5 tahun)	No. 18 Tahun 2013	Disnakertrans
8.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	27/09/2013 (Jangka waktu 5 tahun)	No. 17 Tahun 2013	Disnakertrans
9.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemkab Minahasa Selatan	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara	29/09/2014 (Jangka waktu 5 tahun)	No. 40 Tahun 2014	Disnakertrans
10.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur	27/09/2013 (Jangka waktu 10 tahun)	No. 47 Tahun 2014; No. HK.1441 Tahun 2014	PD. Dharma Jaya DKPKP
11.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, PT. KAR, PD.DHARMA JAYA, Dan Pemerintah Kabupaten Kupang	Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, PT. KAR, PD.DHARMA JAYA, Dan Pemerintah Kabupaten Kupang tentang Penerapan dan Pengembangan IPTEK Agribisnis peternakan sapi terpadu	13/04/2015	No. 07/M/PK/IV/2015 No. 0625/IPH.2/KS/IV/2015 No. 014/PTKAR/04/2015 No. 22.SP.IV.2015 No. 03 Tahun 2015	
12.	Pemprov Sumatera	Perjanjian Kerja	17/6/2015	No. 4621/-072.26	DKPKP

	Barat	Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Sumatera Barat tentang Andon Penangkapan Ikan		No. 523/966-DKP.2/VI/2015	
13.	Kabupaten Bangka Barat	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tentang Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi untuk Penyediaan Daging Sapi bagi Kebutuhan Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi DKI Jakarta;	8/9/2016	Nomor 14 Tahun 2016 dan Nomor 415.4/1/1.20.03.3/2016	
14.	Seluruh Provinsi Anggota MPU	Surat Keputusan Bersama FKD-MPU Tentang Program DAN Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Tahun 2017		NOMOR 68/SK/MPU/2016	
15.	Seluruh Provinsi Anggota MPU	Surat Keputusan Bersama FKD-MPU Tentang PEMBERIAN Kewenangan Kepada Ketua Sekber FKD-MPU untuk Menerima Hibah dan Penerimaan Lainnya yang Sah dari Anggota FKD-MPU atau Pihak Lain bagi Kepentingan FKD-MPU		NOMOR 69/SK/MPU/2016	
16.	Seluruh Provinsi Anggota MPU	Surat Keputusan Bersama FKD-MPU Tentang Penyelenggaraan Promosi Bersama Bersama Tourism, Trade &		NOMOR 70/SK/MPU/2016	

		Investment FKD-MPU yang diselenggarakan di Gedung Indonesua TIC Kuta-Bali			
17.	Seluruh Provinsi Anggota MPU	Surat Keputusan Bersama FKD-MPU Tentang Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah		NOMOR 71/SK/MPU/2016	
18.	Seluruh Provinsi Anggota MPU	Surat Keputusan Bersama FKD-MPU Tentang Rekomendasi Kepada Pemerintah		NOMOR 72/SK/MPU/2016	

Sumber : Biro Tata Pemerintahan 2017

4. Nama Kegiatan

- a. Kerjasama Gubernur 10 (sepuluh) Provinsi dengan nama Forum Mitra Praja Utama (MPU), yang beranggotakan Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat , dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun visi dan misi kerjasama ini adalah “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemitraan melalui peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, kualitas SDM, dan kualitas tenaga kerja”. Kerjasama MPU telah melibatkan banyak SKPD/UKPD sepuluh provinsi, masing-masing masuk dalam 4 (empat) tema kerjasama.
- b. Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek).

Kerja Sama Pembangunan Jabotabek telah berkembang dengan masuknya Kabupaten Cianjur dan Kota Tangerang Selatan ke dalamnya. Hal ini terjadi setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati

Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 Juni 2005 yang diketahui oleh Menteri Dalam Negeri.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerja Sama Pembangunan Jabotabek. Guna mengaktualkan BKSP Jabodetabek sesuai dengan perkembangan daerah dan permasalahannya, maka Kepmendagri tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

- c. Kerjasama bilateral dengan provinsi dan kabupaten lain dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan produksi baru di daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat trans dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi.
- d. Kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan kementerian, lembaga pusat non kementerian, pt, bumd, yayasan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah provinsi dki jakarta, seperti KEMENTERIAN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN, KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA, KEJAKSAAN TINGGI, BPK DAN PEMBANGUNAN, LKPPJ, KANWIL BPN, PERGURUAN TINGGI NEGERI, PERUSAHAAN
- e. Forum APPSI dan APEKSI adalah forum pemerintah provinsi dan kota otonom, dimaksudkan sebagai wadah penyampaian saran dan masukan kepada pemerintah terkait dengan perimbangan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun sebagai tempat

berbagi pengalaman dan pengetahuan antar daerah dalam menangani masalah di daerah dan merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk mengambil langkah sesuai hasil rekomendasi yang disampaikan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah secara administrasi diselenggarakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Bagian Kerjasama Daerah. Secara teknis, pelaksanaan isi perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai **Bagian Kerjasama Daerah** Biro Tata Pemerintahan pada akhir Desember 2016 sebanyak 12 (dua belas) orang.

Tabel 6.5
Rekapitulasi Pegawai Bagian Kerjasama Daerah
Biro Tata Pemerintahan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	11	
	• Golongan IV	1	
	• Golongan III	10	
	• Golongan II	-	
	• Golongan I	-	
B.	Eselon	11	
	• Eselon III	1	
	• Eselon IV	3	
	• Pelaksana (Staf)	7	
C.	Pendidikan	12	
	• S2	6	
	• S1	4	
	• Diploma	1	
	• SLTA	-	

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, 2017

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2017 Bagian Kerjasama Daerah Biro Tata Pemerintahan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.505.434.000

8. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerja sama telah ditetapkan dalam naskah kerja sama oleh kedua belah pihak. Apabila jangka waktu kerja sama berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan bersama.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek didirikan sejak 1976 dan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) masih berjalan hingga saat ini. Kerjasama bilateral dibidang transmigrasi berjangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan dengan pihak ketiga disesuaikan dengan kebutuhan kerjasama. Adapun dengan forum APPSI dan APEKSI merupakan keanggotaan tanpa batas waktu kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.

9. Hasil Dari Kerjasama

Kerjasama daerah telah menghasilkan beberapa manfaat, baik bagi Provinsi DKI Jakarta maupun bagi daerah mitra kerjasama. Bagi Provinsi DKI Jakarta, hasil dari kerjasama daerah antara lain sebagai berikut.

- a. Terpenuhinya pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat berupa hasil pertanian dan peternakan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, mengurangi dampak sosial dan mobilitas penduduk serta pengembangan SDM dan SDA.
- b. Tertampungnya peserta transmigrasi asal DKI Jakarta di daerah tujuan.
- c. Semakin meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan ruang, tata air, transportasi, permukiman, persampahan, penanganan banjir dan lingkungan hidup di kawasan Jabodetabekjur.
- d. Terdapatnya dan bertambahnya Ruang Publik yang disebut Ruang Publik Ramah Anak (RPTRA)
- e. Terdapatnya berbagai aplikasi guna mendukung pelayanan masyarakat.

- f. Terdapatnya Pos Pemadam Kebakaran Guna Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Wilayah DKI Jakarta.
- g. Terdapatnya Sistem Penyediaan Air Minum Reserve Osmosis Di Pulau Untung Jawa
- h. Terlaksananya Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan Pengabdian Masyarakat,
- i. Terdapatnya Peningkatan Penggunaan Layanan Transaksi Non Tunai Dan Perluasan Akses Keuangan Di Provinsi DKI Jakarta.
- j. Terselenggaranya layanan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja harian lepas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

10. Permasalahan dan Solusi

Implementasi dari kerjasama daerah antara lain terhambat oleh banyak faktor, antara lain; kesiapan anggaran di daerah mitra kerja sama, koordinasi internal para pihak dan dukungan administrasi. Untuk mengurangi dan mensinergikan pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara rutin mengikuti agenda-agenda pertemuan forum kerjasama dan memberikan bantuan keuangan khususnya dengan kawasan sekitar Jakarta yang telah memiliki keterkaitan secara fisik dan ruang, ekonomi, sosial, maka pemberian bantuan keuangan kepada daerah Bodetabekjur. Selain itu, diberikan pulan hibah kepada hibah Sekretariat BKSP Jabodetabekjur untuk Operasional Sekretariat BKSP, yang digunakan untuk mendukung sekretariat dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama agar dapat tercapai harapan bersama pemda se-Jabodetabekjur.

Adapun Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bodetabekjur diberbagai sektor pembangunan dalam keterpaduan, keserasian, keterpaduan dan keselarasan pembangunan wilayah sekitar Jakarta dalam rangka mendukung Jakarta sebagai Ibukota Negara. Untuk tahun 2016 diutamakan

dalam rangka penanganan banjir, lingkungan hidup, infrastruktur kebersihan, yang besarnya disesuaikan dengan kepentingan Jakarta dan daerah sekitar.

Adapun perkembangan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jabodetabekjur adalah sebagai berikut :

Tabel 6.6
Belanja Hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jabodetabekjur Tahun 2012-2017

No	Tahun	Jumlah Rp	Keterangan
1	2012	45.000.000.000	6 Kab/Kota (Kab/Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kab/Kota Bekasi), 3 Kab/Kota tidak mencairkan (Kab. Tangerang, Kota Tangsel dan Kab. Cianjur)
2	2013	45.000.000.000	8 Kab/Kota (Kab/Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangsel Kab/Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur), 1 Kab Tangerang tidak mencairkan
3	2014	20,6 M (teralisasi 12,8 M)	3 Kab/Kota mencairkan (Kota Bekasi, Kota Bogor dan kab. Cianjur), 5 Kota/Kab tidak mencairkan (Kab Bekasi, Kab Bogor, Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kab Tangerang), 1 Kota tidak mengusulkan yakni Kota Depok
4	2015	399,361 M (teralisasi 369,674 M)	7 Kab/Kota mencairkan (Kota Bekasi, Kota Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang), 1 Kota/Kab tidak mencairkan (Kab Bekasi), 1 Kota tidak mengusulkan yakni Kota Depok
5	2016	213.601.848.300 (teralisasi 208.527.191.300)	4 Kab/Kota mencairkan (Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang), 5 Kota tidak mengusulkan yakni Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi
6	2017	?	?

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Prov. DKI Jakarta, 2017

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

a. Pihak ketiga yang diajak kerjasama adalah perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

1) Badan Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah

- a) PT. Bakrie Investindo
- b) PT. Metropolitan Kencana
- c) PT. Langgeng Ayom Lestari
- d) Yayasan Sapta Nawami Bhakti
- e) PT. Gerak Maju Abadi
- f) PT. Duta Pertiwi
- g) PT. Kempas Indah Indonesia
- h) PT. Roint Eka Jaya
- i) PT. Pacific Bangun Mas
- j) PT. Dharma Alumas Sakti
- k) PT. Bina Citra Tataswati
- l) PT. Bumi Grafika Jaya
- m) PT. Pacific Prima Buana Mas
- n) PT. ABG Tuna
- o) PT. Gading Raya Propertindo
- p) PT. Duta Masa Nusa
- q) PT. Perwita Margasakti
- r) PT. Hotel Cikini Realty
- s) PT. Grand Indonesia

2) Dinas Perhubungan

- a) PT. Siar Andika WU
- b) PT. Nakia Dwipradita

3) BP LIP

PT. Sarana Cakra Persada

4) Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

- a) Yayasan Pendidikan Tiara Kasih
- b) Yayasan Pendidikan Tunas Muda
- c) PT. Fajar Setia Mandiri
- d) Yayasan Patmos
- e) Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia
- f) PT. Pesona Marga Mandiri
- g) Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur
- h) Yayasan Bukit Sion
- i) PT. Gama Investasi Lestari

- j) PT. Wahana Sejahtera
- k) Yayasan Tugasku
- l) Gereja protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta.
- m) Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading
- n) Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia
- o) Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa
- p) Yayasan Darul Ma'arif
- q) PT. Jaya Real Property

2. Dasar Hukum

Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagian besar menyangkut pengelolaan/pemanfaatan asset daerah. Untuk itu, kerjasama dengan pihak ketiga berpedoman pada :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada Pihak Ketiga;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 11) Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
- 12) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

3. Bidang Kerjasama.

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga terdiri dari beberapa bidang yaitu :

- a. Pengelolaan aset, seperti pengelolaan GOR Sumantri Kuningan, pengelolaan Lingkungan terminal Blok M, pengelolaan Gedung pertokoan Jalan Blustro, pengelolaan JPO bisnis, pengelolaan pelelangan ikan Muara Angke, dll.
- b. Kerjasama operasi
- c. Sewa Aset

Tabel 6.7
Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga

No.	Nama SKPD & Pihak Ketiga	Jenis Aset	Keterangan
A.	BPMP		
1	PT. Bakrie Investindo	Tanah	GOR Sumantri Kuningan
2	PT. Metropolitan Kencana	Jembatan	JPO Multoguna PIM 1 dan 2
3	PT. Langgeng Ayom Lestari	Tanah Terminal	Blok M
4	Yayasan Sapta Nawami Bhakti	Tanah	Rumah Sakit Hewan
5	PT. Gerak Maju Abadi	Gedung	Gedung Pertokoan Jl Blustro
6	PT. Duta Pertiwi	Jembatan	JPU JICT & Gd Dusit Mangga Dua
7	PT. Duta Pertiwi	Jembatan	JPU Harco Madu & Gedung Madu
8	PT. Duta Pertiwi	Jembatan	Jembatan Mutiguna Madu
9	PT. Kempas Indah Indonesia	Jembatan	JPM Pasar Pagi dan Mall Madu
10	PT. Roint Eka Jaya	Jembatan	JPO Grosit Tanah Abang
11	PT. Pacific Bangun Mas	Jembatan	JPO Pasar Cipulir jaksel
12	PT. Dharma Alumas Sakti	Gedung	GOR Sumantri Kuningan
13	PT. Bina Citra Tataswati	Jembatan	JPO Pertokoan Glodok
14	PT. Bumi Grafika Jaya	Tanah	Pengembangan BUMD
15	PT. Pacific Prima Buana Mas	Tanah Bangunan Toko dan SRO	Jl. Bekasi Barat Raya Jaktim
16	PT. ABG Tuna	Jembatan	Pelelangan Ikan Muara Angke
17	PT. ABG Tuna	Jembatan	Jl. Dermaga Kav. I Pluit
18	PT. Gading Raya Propertindo	Jembatan	JPO Psr Regional Tanah Abang
19	PT. Duta Masa Nusa	Jembatan	JPO Jl. KS Tubun
20	PT. Perwita Margasakti	Jembatan	JPO Mall Ambassador
21	PT. Hotel Cikini Realty	Tanah	Hotel Cikini Raya
22	PT. Grand Indonesia	Jembatan Multiguna	Jembatan Multiguna Jl. Teluk Betung Tanah Abang
B.	DINAS PERHUBUNGAN		
1.	PT. Siar Andika WU	Tanah	Tempat Uji KIR, Jaksel
2.	PT. Nakia Dwipradita	Tanah	Tempat Uji KIR, Jakbar
C.	BP LIP		
1.	PT. Cakra Sarana Persada	Tanah	Pengembangan dan Pembangunan Proyek Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BPLP
D.	BPKD		
1	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	Tanah Sekolah	Kalideres Jakarta Barat
2	Yayasan Pendidikan Tunas	Tanah Sekolah	Kedoya Selatan

	Muda		
3	PT. Fajar Setia Mandiri.	Tanah Tanah SPBU	Jl. DI Panjaitan Jaktim
4	PT. Fajar Setia Mandiri	Tanah Tanah SPBU	Jl. Danau Sunter Jakut
5	Yayasan Patmos	Tanah Sekolah	Taman Meruya ilir Blok E7 Jakbar
6	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah Sekolah	Perumahan Buana Blok L4 Jakbar
7	PT. Pesona Marga Mandiri	Tanah	Jl. Petak Baru Pasar Pgi
8	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur	Tanah Sekolah	Taman Alfa Indah Blok A9 Jakbar
9	Yayasan Bukit Sion	Tanah Sekolah	Taman Kebon Jeruk Blok G VII Jakbar
10	PT. Gama Investasi Lestari	Tanah	Komplek Bola Basket Kelapa Gading
11	PT. Wahana Sejahtera	Tanah	Terminal Transit Ciilitan
12	Yayasan Tugasku	Tanah	Jl. Pulo Mas Jakarta Timur
13	Gereja protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta.	Gereja	Blok HF 4 Kelapa Gading Barat
14	Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading	Mesjid	Jl. Pendet Kelapa Gading
15	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia	Gereja	Taman Semanan Indah Blok NA 1 Jakarta Barat
16	Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa	Sekolah	Jl. Swadaya Duren Sawit Jaktim
17	Yayasan Darul Ma'arif	Mesjid	Jl. Lembah Aren Blok K3 Pondok Kelapa jaktim
18	PT. Jaya Real Property	Tanah Jalan	Jembatan Penyeberangan Multiguna di Daerah Senen Jakarta Pusat
E.	GUBERNUR DKI JAKARTA		
1.	PT. Wahana Nusantara	Gedung Kantor	Jl. H.R Rausuna Said Kav. C22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Sumber BPAD, 2017

Tabel 6.8
Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga Bentuk Sewa

No.	Nama SKPD & Pihak Ketiga	Jenis Aset	Keterangan
A.	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROV. DKI JAKARTA		
1	PT. Evi Asia Tenggara	Tanah dan Bangunan	Co Working Space, Jl. Prof. DR. Satrio No. 7, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
2	Yayasan Al-Huda Kelapa Gading	Tanah	Sarana Ibadah dan Sarana Pendidikan, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
3	Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih	Tanah	Co Working Space, Jalan Dharma Raya Blok C1-2, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Kota Adm Jakarta Barat
4	PT. Gerak Maju Abadi	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah Dan Sarana Pendidikan, Jalan Blustru Glodok Rt. 001 Rw. 006 Kel. Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat

5	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Jalan Angsana Raya Blok D8, Kelurahan Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
6	PT. Lingkar Seni Indonesia	Tanah dan Bangunan	Gedung Pertokoan Dan Lahan Parkir, Jalan Teuku Umar Nomor 1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat
7	Yayasan Gondokusumo Suhargo	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah Gereja, Perumahan Taman Surya Blok Mm2, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
8	PT. Bank DKI	Bangunan	Kantor Operasional Bank Dki, Jl. Suryo Pranoto Nomor 8, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
9	Yayasan Muslim Bojong Indah	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jalan Belimbing Raya Blok B.5 Komp. Perum. Bojong Indah, Jak-Bar
10	Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tanah dan Bangunan	Kantor
11	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	Kantor Operasional Bank Dki, Lantai 1 S.D 3 Gedung Balai Kota Blok D, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
C.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROV. DKI JAKARTA		
1	PT. Happyday Utama Indonesia	Sebagian Tanah dan Bangunan	Restoran, Jl. H. Djuanda Nomor 19 Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	PT. Lingkar Seni Indonesia	Tanah dan Bangunan	Galery Budaya Dan Kunstring, Jl. Teuku Umar No. 1 , Menteng Jakarta Pusat
3	Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Sebagian Bangunan dan Kendaraan	Ruang Pameran, Lantai Dasar Blok G Gedung Balai Kota Provinsi Dki Jakarta
4	Yayasan The Gandhi Memorial International School	Tanah	Sarana Pendidikan, Jl. Parang Tritis Vi Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara
5	Yayasan Pendidikan Elka	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar, Perum Klp Gading Permai Dan Perum Sunter Hijau Jakarta Utara
6	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	Tanah dan Bangunan	Poliklinik Kesehatan Dan Sarana Olahraga, Perumahan Taman Pegangsaan Indah Dan Perumahan Gading Griya Lestari, Kecamatan Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara
7	Prima Indo Bahari	Sebagian Tanah	Coldstorage / Pembekuan Ikan, Penjaringan Jakarta Utara

8	Yayasan Al-Amanah Sunter Agung	Bangunan	Sarana Pendidikan, Jl. Sunter Karya Selatan Iv, Blok H, Rt 02 Rw 03, Kel. Sunter Agung Kec. Tj. Priok, Kota Adm. Jakarta Utara
9	RS Atmajaya	Tanah dan Bangunan	Balai Kesehatan, Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara
10	Yayasan Mahatma Gading	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perum. Villa Gading Indah Blok D Kel. Klp Gading Jakarta Utara
11	Yayasan Al-Hidayah	Tanah	Sarana Ibadah, Jalan Tari Klasik, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara
12	PT. KMC Indonesia	Tanah	Arena Olahraga, Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
13	Koperasi Pembina Profesi dan Olahraga Perairan (KPPPOP)	Tanah	Arena Olahraga, Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
14	Yayasan Masjid Al-Musyawaharah	Sebagian Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B2 Kelurahan Kelapa Gading Timur
15	Koperasi Perikanan Mina Jaya	Sebagian Tanah	Stasiun Pengisian Solar, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kel. Pluit Kec. Penjaringan
16	Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jl. Agung Timur 8 Blok O2, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok
17	Yayasan Pusat Pelatihan E & P	Tanah	Sarana Pendidikan, Blok 1.1. Perumahan Permata Buana, Kel. Kembangan Jakarta Barat
18	Yayasan Pusat Pelatihan E & P	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perumahan Permata Buana Blok 1.1 Kel. Kembangan Utara, Jakarta Barat
19	Antilope Madju Puri Indah	Tanah dan Bangunan	Sarana Perdagangan (Pasar Tradisional), Jl. Puri Indah Raya Kompleks Perum. Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat
20	Palang Merah Indonesia Cabang Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan	Sarana Perkantoran, Eks. Kantor Dinas Tenaga Kerja
21	Yayasan Pendidikan Kemurnian	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Blok B. 6 Dan A3 Perum Citra li Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat
22	Yayasan Putera Bahagia	Tanah dan Bangunan	Kegiatan Sosial Masyarakat Dan Sarana Pendidikan, Desa Palasari Kec. Pacet, Jawa Barat
23	PT. T. Energy	Sebagian Tanah	SPBG Busway, Jl. Raya Pondok Gede Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kramat Jati Jakarta Timur
24	Yayasan Perguruan Rakyat	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Jl. Lampiri Raya No. 28 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur
25	Yayasan Dharma Siswa	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Blok B Perum. Pulo Gebang Permai, Pulo Gebang Jakarta Timur
26	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah dan Bangunan	Kantor Pelayanan, Kompleks Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

			Indonesia (BP2TKI)
27	Yayasan Baitul Muhajirin	Tanah	Mesjid, Kavling Dki Phase I Blok I, Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur
28	DPP Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (DPP PAMMI)	Sebagian Gedung	Kantor Sekretariat, Jl Hr Rasuna Said Kav. 22 C Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan
29	PT. Satria Cipta Perkasa	Sebagian Tanah	SPBG, Jl. Mayjen Sutoyo No 1 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jaktim
30	Yayasan Pendidikan Dakwah Islam Al-Falah Pondok Kelapa	Tanah dan Bangunan	Balai Pertemuan Wagra, Perumahan Taman Alfa Indah Blok G1, Kota Administrasi Jakarta Barat
31	Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah Dan Penunjang Pendidikan, Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
32	PT. Bumi Bintang Bersatu	Tanah dan Bangunan	Sarana Olahraga Dan Balai Pertemuan, Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
33	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat "Wijaya Kusuma"	Sebagian Bangunan	Koperasi Pegawai, Kantor Walikota Jakarta Barat
34	PT. Swadaya Niaga Jaya (Smesco's)	Tanah dan Bangunan	Pusat Promosi Kopi Nusantara, Jl. Kh. Mas Mansyur, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat
35	Swadaya Panduarta	Tanah	Sport Center, Jl. Kumala Artha Gading Blok D-11, Kota Adm. Jakarta Utara
36	Yayasan Al Muhajirin Pondok Kopi	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jl. Pondok Kopi V Blok E2 Dan Blok E7 Kel. Pondok Kopi Duren Sawit
37	PT. Setia Utama Island	Tanah	Pendistribusian Listrik, Pulau Tengah, Pulau Pari, Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
D.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. DKI JAKARTA		
1	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	Tanah	Koperasi Pegawai, Jalan Pulau Pantara IV Blok N2 Perum Permata Buana, Kel. Kembangan Utara
2	PT. Gagas Energi Indonesia	Sebagian Tanah	Pengoperasian Mobile Refuelling Unit (Mru) Beserta Infrastruktur Pendukungnya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3	PT. PLN Persero	Sebagian Lahan	Gardu PLN, Jl. Sriwijaya Raya No. 47, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm

			Jakarta Selatan
4	Yayasan Abdi Karya (Yadika)	Tanah	Sarana Pendidikan, Blok Ee4, Perumahan Taman Ratu Indah, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat
5	PT. Holcim Beton	Sebagian Tanah	Pengelolaan Semen Beton, Jalan Ketel I, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara
6	PT. Swarna Jaya Sejahtera	Sebagian Tanah	Spbu, Kawasan Dermaga Pelabuhan Penumpang Kaliadem Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
7	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah	Tanah	Masjid, Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Blok M Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
8	UD. Lautan Mutiara	Sebagian Tanah dan Keseluruhan Bangunan	Coldstorage, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
9	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	Tanah dan Bangunan	Kantor, Jalan Melur I/4 Rt.006/013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
10	Yayasan Diannanda (SD)	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Blok N-3, Perumahan Citra Garden Ii, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
11	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perum. Daan Mogot Baru Blok Na , Jl. Bedugul Kel. Kalideres Jakarta Barat
12	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Dki Jakarta	Sebagian Ruang	Kantin, Di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat Dan Utara, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur
13	PT. Surya Jaya Mandiri	Sebagian Bangunan	Mini Market, Bangunan Tempat Penyeberangan Orang (Tpo) Kota Yang Terletak Di Jalan Pintu Besar Utara, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari
14	Yayasan Meek Nusantara	Sebagian Bangunan	Sarana Pendidikan, Sebagian Bangunan Ruang Kelas Sdn Marunda 02 Yang Terletak Di Jalan Marunda Pulo Rt 003 Rw 007, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
15	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Tanah Dan Bangunan Sarana Pendidikan

			Untuk Tk, Sd Dan Smp Yang Terletak Di Perumahan Taman Ratu, Blok F-7 Dan Blok F-13 No. 2, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
16	Yayasan Al-Ikhwana Meruya	Tanah	Sarana Pendidikan, Taman Meruya Ilir Utara, Blok I-8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
17	Yayasan Halleluya Jakarta	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perumahan Citra Garden Ext 1, Blok. Ae-4, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
18	Yayasan Pelita Bangsa	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perumahan Citra 5, Blok E-7 Citra Garden City, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
19	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM Dan Loker Bank, 22 Kelurahan 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta
20	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM Dan Loker Bank, 58 Kelurahan 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta
21	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	Kantor Operasional, Lantai Dasar Blok C Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I Nomor 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
22	PT. Jaya Sejati Dua	Sebagian Tanah dan Bangunan	Docking Kapal Nelayan, Jalan Mandala Bahari Nomor 5, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
23	PT. Indocater	Tanah	Jaringan Distribusi Kabel Listrik Bawah Laut, Pulau Kaliage, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
24	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan	Sekolah, Komplek Perumahan Citra 5, Blok A-6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
25	PT. Badra Abadi Perkasa	Tanah	Parkir, RSKD Duren Sawit Jalan Duren Sawit Baru No. 2 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
26	PT. Usaha Cerah Berjaya Indonesia	Tanah dan Bangunan	Café, Areal Rsd Koja, Jalan Deli Nomor 4 Rt. 012, Rw. 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara

27	Yayasan Pondok Karya Pembangunan	Sebagian Tanah dan Bangunan	Sekolah, Jalan Raya Pkp, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur
28	PT. Unggul Dian Perkasa	Sebagian Tanah	SPBG, Terminal Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur
29	Yayasan Tanimbar Lestari	Tanah	Sekolah, Komplek Perumahan Citra I Ext. Blok Aa-5, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
30	Yayasan Pendidikan Citra Adhi Pratama	Sebagian Tanah	Sekolah, Jalan Outer Ring Road Kayu Besar Nomor 1, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat
31	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM, RSUD Budhi Asih, RSUDPasar Rebo Dan RSKD Duren Sawit
32	PT. Usaha Cerah Berjaya Indonesia	Sebagian Tanah dan Bangunan	Restoran/Café, Rsud Tarakan Di Jalan Kyai Caringin Nomor 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
33	PT. Bank DKI	Tanah dan Bangunan	Kantor Operasional, Lantai 1 S/D 3 Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryo Pranoto Nomor 8, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Adminiistrasi Jakarta Pusat
34	PT. Pertamina Gas	Ruang Bawah Tanah	Penempatan Pipa Transmisi Gas, Areal Pergudangan Jalan Tongkol (Krapu) Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara
35	Yayasan Safa Marwah	Tanah dan Bangunan	Masjid, Jalan Muzdalifah, Komplek Perumahan Qarya Thayyibah, Blok B, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat
36	Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Dki Jakarta	Tanah dan Bangunan	Kantor, Jalan Kramat Sawah, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat
37	PT. Seabreez Indonesia	Sebagian Tanah dan Bangunan	Café, Areal RSUD Koja, Jalan Deli Nomor 4, Rt.012 Rw 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
38	Yayasan Anak Bangsa Basmol	Tanah dan Bangunan	Sekolah, Jalan Tanggul Cengkareng Drain Nomor 1 Basmol, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
39	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan	Sekolah, Komplek Perumahan Citra 5, Blok D-6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
40	PT. Trust Parking Indonesia	Halaman dan	Lahan Parkir, Jl. Kyai Caringin,

		Basement	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
41	PT. Diansyah Dinamika Warna	Sebagian Tanah dan Bangunan	Kantin, Jl. Kyai Caringin No. 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
42	Koperasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	Sebagian Tanah dan Bangunan	Koperasi, Fotocopy Dan Kantin, Jl. Kyai Caringin No. 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
43	PT. Gagas Energi Indonesia	Sebagian Tanah	Pengisian Bahan Bakar Gas, Jl. Kyai Tapa/Jalan Dr. Soesilo Raya, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
44	Yayasan Suhargo Gondokusumo	Tanah dan Bangunan	Sekolah (SMP dan SMA Mentari), Jl. Paradise Boulevard Utara, Blok Paradise 16, Komplek Perumahan Taman Surya 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
45	Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Dki Jakarta	Sebagian Tanah dan Bangunan	Galeri, Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Kawasan Museum Fatahillah/Kawasan Kota Tua, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat
46	Koperasi Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja (Kopkarko)	Sebagian Tanah	Kantor Koperasi, Kantin, Tempat Foto Copy, Cetakan Dan Mini Market, Jl. Deli No. 4 Rt. 02 Rw. 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Adm. Jakarta Utara
47	PT. Gagas Energi Indonesia	Sebagian Tanah	Mobile Refueling Unit (MRU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Jl. Medan Merdeka Selatan, Kota Adm. Jakarta Pusat
48	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	Kantor Operasional, Lantai Dasar Blok C Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I Nomor 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
E.	DINAS KEHUTANAN PROV. DKI JAKARTA		
1	PT. Aetra Air Jakarta	Sebagian Tanah	Pompa Reservoir Dan Instalasi Pompa Tekan, Jl. Sunter Permai Raya/Jl. Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara
F.	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. DKI JAKARTA		
1	Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Dki Jakarta	Sebagian Tanah	Perbaikan Dan Perawatan Kapal Ikan Dan Kapal Lainnya (Docking Kapal), Jalan Mandala Bahari Nomor 1, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi

			Jakarta Utara.
2	PT. Gabungan Samudera Internasional	Sebagian Tanah	Pengolahan Ikan Dan Gudang Pendingin Ikan (Cold Storage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
3	PT. Sanjaya Internasional Fishery	Sebagian Tanah	Pengolahan Ikan Dan Gudang Pendingin Ikan (Cold Storage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
4	UD. Mina Sari	Sebagian Tanah	Pengolahan Ikan Dan Gudang Pendingin Ikan (Cold Storage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
5	PT. Karya Syukur Maju Bersama	Sebagian Tanah	Perbaikan Dan Perawatan Kapal Ikan Dan Kapal Lainnya (Docking Kapal), Jalan Mandala Bahari Nomor 3, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
F.	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROV. DKI JAKARTA		
1	PT. Aman Samudera Indonesia	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan Dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
2	PT. Marcelindo Citra Lestari	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan Dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
3	PT. Yoma Mina Sejahtera	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan Dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Dermaga Muara Angke/Jl. Pendaratan Ikan Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
4	PT. Fan Marina Shipyard & Co	Sebagian Tanah	Tempat Perbaikan Dan

			Perawatan Kapal Ikan Dan Kapal Lainnya (Docking Kapal), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Mandala Bahari No.3, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
5	PT. Alam Segar Jaya	Sebagian Tanah	Coldstorage Dan Gudang, Areal Pasar Ikan Muara Angke
G.	KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DKI JAKARTA (BPIPM)		
1	PT. Majuan Masittah Latief	Tanah	Pabrik Kelapa Sawit, Jalan Raya Sumur Timur Kavling Blok Iii Aa No. 9-10, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur
2	PT. Tunas Dipta Persada	Tanah	Kantor, Jalan Industri No. 9-11 (Unit Aloca) Jakarta Pusat
H.	LURAH GELORA PROV. DKI JAKARTA		
1	PT. Balats Dwi Tunggal	Sebagian Tanah	Restoran, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 1, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
I.	BIRO UMUM SETDA		
1	PT. Jakarta Tourisindo	Sebagian Tanah	Gerai Makanan Dan Minuman Jak Bistro, Areal Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Blok B, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
J.	RSUD BUDHI ASIH		
1	PT. Usaha Cerah Berjaya Abadi	Sebagian Tanah dan Bangunan	Café, Jl. Dewi Sartika No. 200, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Adm. Jakarta Timur
K.	RSUD KOJA		
1	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM, RSUD Koja
2	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM, RSUD Koja
3	PT. Adhikarsa Cipta Sentosa	Tanah dan Bangunan	Alat Penyedia Mesin Cepat Saji (Vending Machine), Rsud Koja, Jl. Deli No. 4 Rt. 012 Rw.007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Adm. Jakarta Utara
4	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM, RSUD Koja
5	CV. Vista Ingan Perdana	Tanah dan Bangunan	Usaha Makanan Dan Minuman, Jl. Deli No. 4 Rt. 012 Rw. 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja,

			Kota Adm. Jakarta Utara
L.	RSUD PASAR MINGGU		
1	PT. Adicipta Boga Intiprima	Sebagian Bangunan	Bread Store Imperial Cakery, RSUD Pasar Minggu
2	PT. Diansyah Dinamika Warna	Sebagian Bangunan	Kantin Di RSUD Pasar Minggu, RSUDPasar Minggu
M.	RSUD PASAR REBO		
1	PT. Usaha Cerah Berjaya Abadi	Sebagian Tanah dan Bangunan	Café, Jl. Letnan Jendral Tb Simatupang No. 30, Rt 09 Rw 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur
N.	TAMAN MARGASATWA RAGUNAN (TMR)		
1	PT. Harco Abadi Jaya (Perpanjangan)	Tanah	Sarana Rekreasi, Taman Margasatwa Ragunan Jalan Harsono Rm Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Adm Jakarta Selatan
2	PT. Stella Jaya Abadi	Sebagian Tanah	Tempat Freezer Ice Cream, Penampungan/Pool Becak/Gerobak Dan 50 Titik Penjualan Ice Cream Miami, Jl. Harsono Rm No. 1 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan
3	CV. Virgini Abadi	Sebagian Tanah	Sarana Rekreasi Dan Hiburan, Jl. Harsono Rm No. 1 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan

Sumber BPAD, 2017

4. Nama Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi 3 kegiatan, yakni :

- a. Pengelolaan dan pembangunan sarana fisik asset (BTO dan BOT)
- b. Kerjasama operasi.
- c. Pemanfaatan/Sewa Aset (BTO dan BOT)

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

- a. Badan Penanaman Modal dan Promosi melalui Bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk kegiatan kerjasama pengelolaan, dan pembangunan aset daerah.

- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, untuk kegiatan Sewa Aset daerah
 - c. Dinas Perhubungan untuk kegiatan kerjasama operasi (KSO)
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang mengelola kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 47 orang dari 3 SKPD dengan rincian dan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 6.9
Rekapitulasi Pegawai Badan Pengelola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

No	Kualifikasi	Jumlah			
		BPMP	BPKD	Dishub	Total
A.	Golongan	12	22	13	47
	1. Golongan IV	1	2	1	4
	2. Golongan III	10	18	9	37
	3. Golongan II	1	2	2	5
	4. Golongan I	0	0	1	1
B.	Eselon	12	22	13	47
	1. Eselon II	-	-	-	-
	2. Eselon III	1	1	1	3
	3. Eselon IV	2	3	3	8
	5. Pelaksana	9	18	9	36
C.	Pendidikan	12	22	13	47
	1. S3	0	0	0	0
	2. S2	1	1	0	2
	3. S1	10	15	7	32
	4. Diploma	0	4	0	0
	5. SLTA	1	2	6	9
	6. SLTP	0	0	1	0
	7. SD	0	0	0	0

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga berasal dari pihak ketiga, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 6.10
Nilai Inventasi dan Nilai Aset Kerjasama dengan Pihak ketiga

No	Jenis Kerjasama	Nilai Inventasi/ Bangunan	Nilai Aset	Ket.
1.	BOT	60,538,462,572	2,944,316,110,000	
2.	KSO	306,605,779,808	884,593,925,000	
3.	BTO	-	21,388,600,000	
	Jumlah	367,144,242,380	3,850,298,635,000	

Sumber BPKD, 2017

Dari kerjasama tersebut, total nilai aset kerjasama sebesar Rp 4.217.442.877.380 dengan rincian :

- BTO sebesar Rp 1.191.199.704.808
- BOT sebesar Rp. 3.004.854.572.572
- KSO sebesar Rp 21.388.600.000

8. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerja sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu minimal 1 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi.

9. Hasil dari Kerjasama

Kerjasama Pemanfaatan Aset dilakukan dengan metode sewa aset daerah dan kerjasama aset daerah. Sewa aset daerah yang direncanakan Pemerintah Prov. DKI Jakarta memperoleh pendapatan Rp 51.871.439.506,00 hanya terealisasi Rp.60.000.000.000,00 atau 86,45%. Sedangkan kerjasama aset daerah terealisasi sebesar Rp. 48.572.845.587,00 atau 75,61% % dari rencana semula sebesar Rp.4.241.232.500,00. Dengan demikian, kerjasama pemanfaatan aset secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp.100.444.285.093,00 atau 156,35% dari rencana sebesar Rp.64.241.232.500,00. Hasil dari kerjasama ini adalah adanya pendapatan daerah yang berasal dari penyertaan modal daerah, sewa aset daerah, dan kerjasama pemanfaatan aset daerah.

10. Permasalahan Dan Solusi

Tidak semua kerjasama hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu dilakukan evaluasi setiap tahun.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi

Forum koordinasi disesuaikan dengan besaran dan ruang lingkup permasalahan, sehingga bentuknya dapat berupa :

- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai pengganti Musyawarah Pimpinan Daerah sesuai PP Nomor 19 Tahun 2010.
- b. Rapat Pimpinan
- c. Rapat Koordinasi
- d. Rapat Evaluasi
- e. Koordinasi teknis
- f. Rapat biasa.
- g. Kegiatan lain yang memerlukan keterlibatan instansi vertikal, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, tim kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tim asistensi dalam suatu kegiatan dan lain-lain.

2. Materi Koordinasi

Materi koordinasi menyangkut berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Konfirmasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas instansi vertikal.
- c. Peningkatan kualitas SDM
- d. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- e. Pemecahan/penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan tugas instansi vertikal.
- f. Penerimaan keuangan negara, termasuk dalam rangka penyampaian DIPA.
- g. Ipoleksosbudhankamnas.
- h. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (dengan PT PLN Disjaya)
- i. Operasional Samsat Keliling
- j. Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi
- k. Pembiayaan.

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menjalin

hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, kemudian yang dimaksud dengan instansi vertikal di daerah dalam undang-undang ini adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, yang menjelaskan Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Atas dasar peraturan dan perundang-undangan tersebut, maka instansi vertikal yang ada di Jakarta antara lain :

- a. Kodam Jaya
- b. Polda Metro Jaya
- c. Pengadilan Tinggi Jakarta
- d. Kejaksaan Tinggi Jakarta
- e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- f. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
- g. Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta
- h. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- i. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
- j. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- k. Kanwil III Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- l. Kanwil VI Direktorat Jenderal Pajak
- m. Kanwil IV Bea dan Cukai Jakarta.
- n. Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Negara
- o. Kepolisian Daerah
- p. Instansi TNI, seperti Kodam, Armabar, Arhanud
- q. PT PLN Distribusi Jakarta Raya

4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Anggaran untuk koordinasi belum dapat diinventarisasi secara pasti, karena melekat pada SKPD/UKPD penyelenggara (leading sektor) koordinasi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan urgensinya. Inisiatif koordinasi bisa dari Pemerintah DKI Jakarta atau instansi vertikal yang bersangkutan.

Secara tupoksional, koordinasi pada lingkup Sekretariat Daerah dilakukan oleh para Asisten Sekretaris Daerah. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan. Kegiatan koordinasi tidak ditangani secara khusus oleh SKPD tertentu, tetapi dapat dilakukan oleh setiap SKPD sesuai dengan keperluannya.

6. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi tidak tercatat secara pasti, mengingat kegiatan koordinasi bisa datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau instansi vertikal yang bersangkutan.

7. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat koordinasi antara lain :

- a. Adanya keterlibatan instansi vertikal dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Adanya sinkronisasi program atau kegiatan antara instansi vertikal dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Adanya kontribusi tertentu dari dan atau kepada instansi vertikal sesuai dengan hasil koordinasi. Contoh instansi vertikal tertentu menyaipkan

buku materi untuk sosialisasi tertentu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan operasional, dan lain-lain.

- d. Adanya kelancaran kegiatan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun instansi vertikal.
- e. Adanya saling manfaat bersama lainnya (*mutual benefit*).

8. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.

Tindak lanjut hasil koordinasi sangat variatif sesuai dengan urgensi koordinasi. Ada yang bersifat operasional seperti kegiatan pengamanan, ada yang bersifat kebijakan seperti keluarnya NJOP, ada yang bersifat bantuan finansial untuk kegiatan tertentu, validasi data, kerjasama operasional dan lain sebagainya.

9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Mengingat masih terdapat beberapa instansi vertikal di Provinsi, maka ketentuan tentang koordinasi sebaiknya diperbaharui.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah

Selama tahun 2017 tidak terdapat sengketa batas wilayah

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Substansi Pembinaan Batas Wilayah merupakan salah satu tupoksi Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah Bagian Bina Pemerintahan .

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sampai dengan 31 Desember 2017 pegawai **Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah** Bagian Bina Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan sebanyak 3 orang.

Tabel 6.11
Rekapitulasi Pegawai Subbagian Penataan dan
Pengembangan Wilayah Biro Tata Pemerintahan

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	3	
	• Golongan IV	0	
	• Golongan III	4	
	• Golongan II	0	
B.	Eselon	1	
	• Eselon IV	1	
	• Pejabat Fungsional Umum	2	
C.	Pendidikan	3	
	• S2	0	
	• S1	2	
	• Diploma	1	
	• SLTA	0	
	• SLTP	0	
	• SD	0	

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, 2017

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dilihat dari kondisi geografi, demografi, sosial maupun kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, ada beberapa potensi yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta rawan bencana antara lain :

- Sebagai daerah pantai, bencana mungkin datang dari laut seperti adanya banjir pasang air laut, tsunami dan erosi pantai (abrasi).
- Sebagai muara dari 13 sungai, potensi bencana berupa banjir, pencemaran air dan sampah yang terbawa dari daerah hulu.
- Sebagai daerah yang padat penduduk, bencana yang potensial terjadi seperti kebakaran dan wabah penyakit.
- Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki potensi menjadi tempat pelaku kejahatan nasional maupun internasional, seperti kegiatan terorisme, perdagangan narkoba dan lain-lain.

Dari beberapa potensi tersebut, terdapat bencana yang intensitas/frekuensinya cukup tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Bencana Yang Terjadi

a. Kebakaran

Sejak Januari – Desember 2017, telah terjadi kebakaran sebanyak 1.471 kejadian, dengan uraian kejadian kebakaran sebagaimana terjabarkan dalam rekapitulasi kejadian kebakaran berdasarkan bulan, wilayah, penyebab kebakaran, waktu terjadinya kebakaran serta obyek yang terbakar, sebagaimana berikut.

Tabel 6.12
Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2017

No.	Bulan	Frekuensi Kebakaran	
		(kali)	(%)
1	Januari	104	7,07%
2	Pebruari	77	5,23%
3	Maret	106	7,21%
4	April	97	6,59%
5	Mei	123	8,36%
6	Juni	135	9,18%
7	Juli	125	8,50%
8	Agustus	171	11,62%
9	September	179	12,17%
10	Oktober	116	7,89%
11	Nopember	108	7,34%
12	Desember	130	8,84%
	Grand Total	1.471	100%

Sumber Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 2017

Rekapitulasi kebakaran per wilayah

<i>Jakarta Pusat</i>	:	189	Kali	=	12,8%
<i>Jakarta Utara</i>	:	265	Kali	=	18,0%
<i>Jakarta Barat</i>	:	325	Kali	=	22,1%
<i>Jakarta Selatan</i>	:	316	Kali	=	21,5%
<i>Jakarta Timur</i>	:	360	Kali	=	24,5%
<i>Kepulauan Seribu</i>	:	16	Kali	=	1,1%

Sumber Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 2017

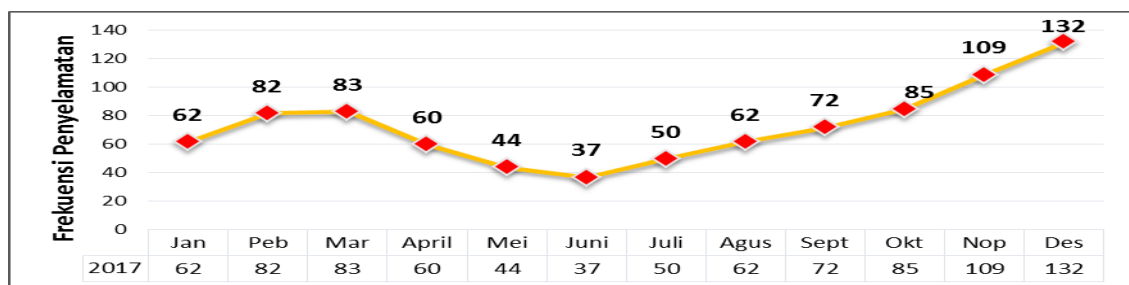
b. Penyelamatan (kejadian Non- Kebakaran)

Pada Periode Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2017 telah dilaksanakan operasi penyelamatan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, seperti penyelamatan pada bencana transportasi, pada bangunan runtuh, pada air (banjir), pada beda ketinggian, pada pengendalian hewan dan pohon tumbang, dengan uraian antara lain :

Jumlah penyelamatan di Provinsi DKI Jakarta pada periode Januari s.d. Desember tahun 2017 sebanyak 878 kali dengan perincian sebagai berikut :

- *Bulan Januari* : 62 Kali
- *Bulan Pebruari* : 82 Kali
- *Bulan Maret* : 83 Kali
- *Bulan April* : 60 Kali
- *Bulan Mei* : 44 Kali
- *Bulan Juni* : 37 Kali
- *Bulan Juli* : 50 Kali
- *Bulan Agustus* : 62 Kali
- *Bulan September* : 72 Kali
- *Bulan Oktober* : 85 Kali
- *Bulan November* : 109 Kali
- *Bulan Desember* : 132 Kali

**Grafik Trend Penyelamatan Di Bulan DKI Jakarta
Periode Januari s.d. Desember Tahun 2017**



Jumlah Penyelamatan di Provinsi DKI Jakarta pada periode Januari s.d. Desember tahun 2017 sebanyak 878 kali dengan perincian sebagai berikut :

- *Jakarta Pusat* : 124 Kali
- *Jakarta Utara* : 133 Kali
- *Jakarta Barat* : 132 Kali
- *Jakarta Selatan* : 260 Kali
- *Jakarta Timur* : 205 Kali
- *Kepulauan Seribu* : 24 Kali

2. Status Bencana

Status bencana di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 masih bersifat lokal sampai regional sama seperti tahun sebelumnya. Bencana kebakaran pada umumnya bersifat lokal tetapi bencana banjir bisa bersifat regional karena terjadi pada beberapa kota secara bersamaan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Adapun anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017 sebesar Rp 785.270.318.491 dengan rincian sebagai berikut.

REKAPITULASI PENYERAPAN APBD TA 2017
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	UKPD	ANGGARAN	PENYERAPAN	
		APBDP	(Rp)	%
1	Dinas Gulkarmat	704.766.005.534	649.235.099.714	92,12%
	A. Belanja Tidak Langsung (BTL)	663.714.359.300	626.320.423.444	94,37%
	B. Belanja Langsung (BL)	41.051.646.234	22.914.676.270	55,82%
2	Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat	13.566.492.110	9.383.535.219	69,17%
3	Sudin Gulkarmat Jakarta Utara	11.401.005.371	10.250.303.765	89,91%
4	Sudin Gulkarmat Jakarta Barat	19.165.083.056	14.656.753.047	76,48%
5	Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan	8.190.961.793	5.973.522.308	72,93%
6	Sudin Gulkarmat Jakarta Timur	18.889.267.285	14.944.397.255	79,12%
7	UPT Laboratorium	939.404.394	808.981.931	86,12%
8	UPT Pusdiklatkar	8.352.098.948	6.087.163.381	72,88%
TOTAL DINAS + SUDIN + UPT		785.270.318.491	711.339.756.620	90,59%

(Sumber : <https://monev.bapedadki.net>)

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

a. Antisipasi Bencana Kebakaran

Upaya pencegahan bencana kebakaran pada tahun 2017 antara lain dilakukan dengan :

- Pendayagunaan Bantuan Sukarela Kebakaran (Balakar) pada saat penanggulangan kebakaran

- Kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Pemeriksaan dan pengawasan bangunan dan lingkungan termasuk akses mobil Penanggulangan Kebakaran, sumber air dan tempat berkumpul untuk kepentingan rencana operasional kebakaran.
- Pelayanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
- Pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan bangunan dan lingkungan.
- Sosialisasi pengamanan rumah, gedung dan bangunan dari bahaya kebakaran.
- Pelatihan dan simulasi penyelamatan jika terjadi kebakaran bagi masyarakat maupun pengguna gedung perkantoran.
- Pemeriksaan dan pengawasan secara berkala bangunan dan atau lingkungan terhadap potensi kebakaran, sarana keselamatan jiwa, kesiapan sarana pencegahan kebakaran, aksesibilitas petugas Penanggulangan Kebakaran dan sistem pengamanan kebakaran.
- Pengawasan dan pengendalian tata cara menyimpan dan menggunakan serta mengangkut barang mudah terbakar dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3).
- Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan penanggulangan.
- Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2008

b. Antisipasi Bencana banjir

1) Upaya struktural berupa :

- a) Relokasi Pemukiman dibantaran kali
- b) Pengerukan kali / saluran / drainase
- c) Penyelesaian sistem pompa dan pembangunan *long storage*
- d) Pemeliharaan dan pembersihan saluran/kali
- e) Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk menangani genangan di jalan arteri dan kolektor

2) Upaya non struktural berupa :

- a) Sosialisasi pemeliharaan kebersihan lingkungan.
- b) Kerja bakti kebersihan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat.
- c) Membangun dan memfungsikan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan fungsi pintu air sebagai indikator tingkat kesiagaan banjir, seperti pintu air Katulampa,

Depok dan Manggarai.

d) Koordinasi dan siaga banjir lintas sektoral.

e) Sinkronisasi perencanaan tata ruang di kawasan Jabodetabekjur.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Penanganan bencana di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh beberapa SKPD sesuai dengan status bencana, volume bencana dan antisipasi atau penanggulangan yang harus dilakukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara rutin penanganan bencana karena tupoksinya adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan beberapa SKPD lain.

Tahun 2011 telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang sudah beroperasi secara efektif mulai tahun 2012.

SKPD yang menangani bencana berdasarkan Pergub 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Walikota/Bupati Administrasi
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Dinas Tata Air
5. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial
8. Dinas Kebersihan
9. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
10. Dinas Perindustrian dan Energi
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas pendidikan
13. Dinas Olah Raga dan Pemuda
14. Dinas Kelautan Pertanian dan Perikanan

15. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
16. Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan
17. Dinas Penataan Kota
18. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
19. Badan Penanaman Modal Dan Promosi
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
22. Kecamatan
23. Kelurahan
24. RSUD

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Khusus pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dengan jajarannya sampai ke tingkat Kecamatan berjumlah 3.270 orang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.13
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	2755	
	• Golongan IV	23	
	• Golongan III	850	
	• Golongan II	1872	
	• Golongan I	10	
B.	Eselon	2755	
	• Eselon II	1	
	• Eselon III	12	
	• Eselon IV	82	
	• Staf	0	
C.	Pendidikan	1	
	• S3	2659	
	• S2	2755	
	• S1	1	
	• Diploma	35	
	• SLTA	359	
	• SLTP	25	
	• SD	2280	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran, 2017

7. Kelembagaan yang Dibentuk Khusus menangani Bencana

Penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 sebagai *leading sector* dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai pelaksana lapangan.

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, selain potensi bencana kebakaran, banjir dan wabah penyakit, potensi lain adalah bencana akibat tindak sabotase dan terorisme mengingat Jakarta sebagai kota internasional. Sedangkan bencana lainnya adalah gempa bumi, karena Jakarta berada pada daerah rawan gempa terutama yang berasal dari Selat Sunda dan Laut Samudera Hindia.

Bencana alam yang rutin adalah bencana banjir, karena kondisi geografi Kota Jakarta yang sebagian berada di bawah permukaan laut pasang, serta banyaknya sungai yang mengalir dan bermuara di teluk Jakarta. Potensi bencana di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana :

1. Banjir
2. Kebakaran pemukiman
3. Epidemi dan Wabah Penyakit
4. Konflik Sosial
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
6. Kegagalan Teknologi
7. Cuaca ekstrim
8. Gempa Bumi

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penanggulangan bencana antara lain berupa sarana dan prasarana pemadam kebakaran, sarana evakuasi korban bencana, dapur umum dan alat-alat lainnya yang digunakan secara

terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

Tabel 6.14
Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran

No	Uraian	Jumlah
A.	Gedung	
	1. Kantor Dinas	1 Gedung
	2. Kantor Suku Dinas	5 Gedung
	3. Kantor Sektor	25 Gedung
	4. Pos Pemadam	77 Gedung
	5. Pusat Pendidikan dan Latihan	1 Kawasan
	6. Kantor Bengkel	1 Kawasan
	7. Kantor Laboratorium	1 Gedung
B.	Kendaraan Operasional	
	1. Mobil Pompa 2.500 L	74 unit
	2. Mobil Pompa 4.000L	153 unit
	3. Mobil Pompa 10.000L	32 unit
C.	Peralatan Pendukung Operasional	
	1. Perahu Karet	125 unit
	2. Motor Pompa	103 unit
D.	Alat Komunikasi	
	1. Radio HT	610 buah
	2. Radio RIG	240 buah
	3. Alarm Kota	2.456 titik

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 2017

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Dalam Pengelolaan kawasan khusus tidak terdapat perubahan. Kawasan dalam hal ini bukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kawasan dalam arti luas, yaitu suatu wilayah yang dikelola oleh pihak tertentu karena memiliki karakteristik atau fungsi tertentu. Di Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa kawasan yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Jenis Kawasan

- a. Kawasan otorita (Dikelola Pusat), yaitu Gelora Bung Karno dan Bandar Baru Kemayoran.
- b. Kawasan Pelabuhan (Dikelola Pusat, Pemda dan Swasta), yaitu : Pelabuhan Tanjung Priok; Pelabuhan Sunda Kelapa; Pelabuhan Ikan Muara Baru; Pelabuhan Marunda; dan Pelabuhan Khusus (Bogasari dan Pertamina).
- c. Kawasan Bandar Udara (Dikuasai ABRI), yaitu Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
- d. Kawasan Industri (Dikelola Pemda dan Swasta), yaitu : Kawasan berikat Nusantara; dan Perkampungan Industri Kecil (PIK).
- e. Kawasan Kehutanan (Dikelola Pemda), yaitu Hutan Lindung Muara Angke; dan Taman Laut Kepulauan Seribu.
- f. Kawasan Pariwisata (Dikelola oleh Badan Pengelola Nasional dan Daerah), yaitu Taman Mini Indonesia Indah; Monumen Nasional; Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur; Ancol, Kebun Binatang Ragunan.
- g. Kawasan Jalan Bebas Hambatan (Dikuasai PT. Jasa Marga dan Swasta), yaitu : Jalan Tol Dalam Kota; Jalan Tol Merak; Jalan Tol Jagorawi; Jalan Tol Cikampek; Jalan Tol TB Simatupang (Pondok Indah); dan Jalan Tol Prof. Sedyatmo.
- h. Kawasan Militer (dikuasai ABRI), yaitu : Kawasan Militer Cijantung; dan Kawasan Militer Cilangkap.

2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus

Sebagaimana telah dijelaskan, status kepemilikan sesuai dengan status kepengolaannya, yaitu milik Pusat oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian (seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan), milik Daerah oleh SKPD, BUMD dan swasta.

3. Sumber Anggaran

Sumber anggaran pengelolaan kawasan-kawasan tersebut diatas dibebankan kepada APBN untuk kawasan yang dikelola oleh Pusat dan BUMN, APBD untuk kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan anggaran oleh pihak swasta untuk kawasan yang dikelola swasta.

4. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bahwa kawasan-kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dapat dikelola bersama dengan Pemerintah Daerah, dan atau minimal terdapat kontribusi untuk Pemerintah Daerah. Hal ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, akan tetapi hingga saat ini belum terdapat tanggapan yang realistis.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus

Meskipun terdapat banyak kawasan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi dikarenakan kepemilikan, anggaran dan pengelolaannya berbeda-beda, maka tidak terdapat satuan kerja khusus yang menangani berbagai kawasan khusus dimaksud. Kawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya kawasan Hutan Lindung Muara Angke yang dikelola Dinas Kelautan dan Pertanian, Taman Laut Kepulauan Seribu yang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan dan Pertanian dan Kawasan Monas yang dikelola oleh UPT Kawasan Monas.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah dan kualifikasi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengelola kawasan dimaksud sebagaimana uraian pada urusan wajib dan urusan pilihan di Bab III sesuai dengan bidangnya masing-masing.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum

1. Gangguan Yang Terjadi

Tujuan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki dari setiap Pemerintah Daerah,

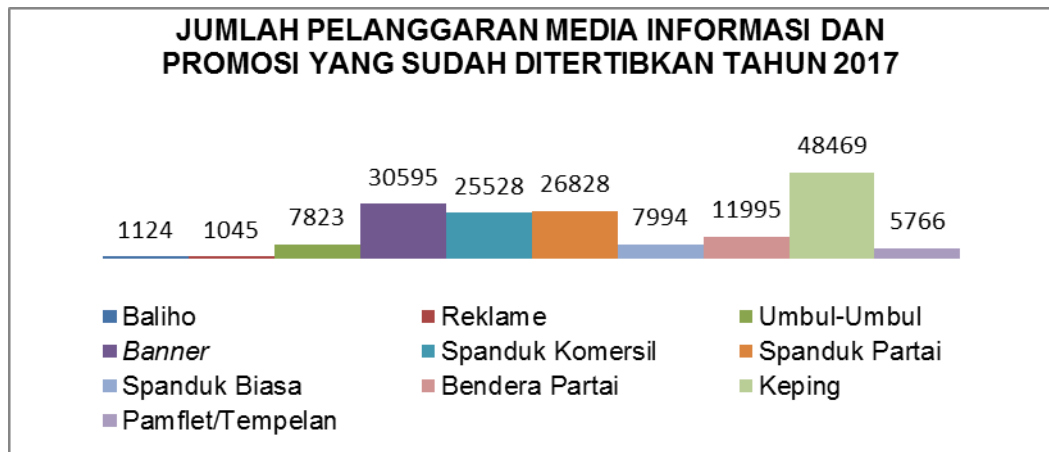
keadaan masyarakat yang tentram dan kondusif. Penyelenggaraan tramtibum sendiri merupakan pengharapan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom yang menjadi tolak ukur pemerintahan daerah tidak hanya dihadapkan pada permasalahan sosial tetapi juga dihadapkan pada permasalahan nasional yang dilakukan oleh para elit, individu, golongan atau kelompok tertentu. Hal ini tentu mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Jakarta sehingga diperlukan fasilitas untuk mencapai keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat Jakarta. Adapun gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang potensial terjadi di DKI Jakarta antara lain:

a. Konflik Sara

Tahun 2017 merupakan tahun politik bagi Provinsi DKI Jakarta karena pada tahun ini pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta digelar. Tiga pasangan calon berlomba-lomba menyampaikan visi dan misi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Para pendukung dan simpatisan juga berlomba-lomba mempromosikan pasangan calon yang diusungnya melalui berbagai media informasi dan promosi. Konflik SARA yang terjadi pada tahun 2016 terkait kasus penistaan agama masih dirasakan dampaknya di tahun 2017. Tercatat ada 4.374 spanduk provokatif yang ditujukan kepada pasangan calon tertentu yang telah ditertibkan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Selain spanduk provokatif, terdapat 167.167 media informasi lain yang ditertibkan. Media informasi tersebut meliputi baliho, reklame, umbul-umbul, *banner*, spanduk komersil, spanduk partai, spanduk biasa, bendera partai, keping dan pamflet/tempelan

Grafik 1. Jumlah Media Informasi dan Promosi yang ditertibkan



b. Bangunan Liar atau Hunian Liar

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah menertibkan bangunan liar yang tidak sesuai dengan peruntukan zonasi yang tertuang dalam Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Provinsi DKI Jakarta. Jumlah bangunan liar yang ditertibkan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5.331 bangunan.

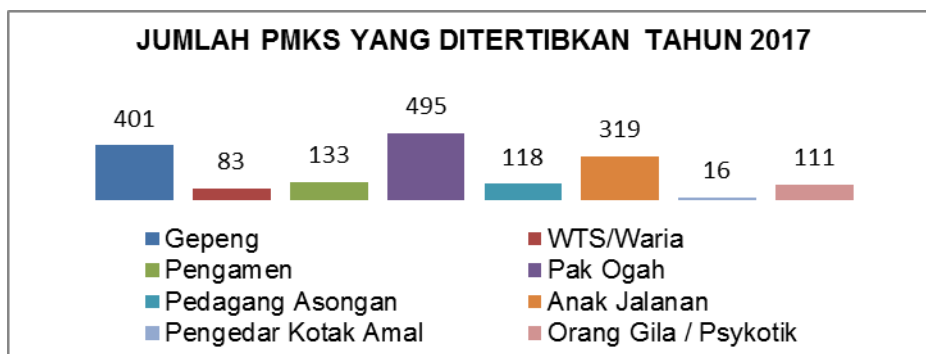
c. Rawan Konflik Sosial

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berperan serta dalam mengamankan dan menertibkan daerah rawan konflik sosial. Tercatat ada 68 kejadian tawuran dan 799 aksi unjuk rasa terjadi sepanjang tahun 2017.

d. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum masih sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 masih marak terjadi. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tempat-tempat umum dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah menertibkan sebanyak 12.759 PKL dan 1.676 PMKS.

Grafik 2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Ditertibkan



e. Pelaksanaan Bulan Tertib Trotoar Tahun 2017

Pada bulan Agustus 2017, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan kegiatan Bulan Tertib Trotoar (BTT) di Lima wilayah Kota Administrasi sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar. Kegiatan Bulan Tertib Trotoar ini dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat yang nyaman bagi para pejalan kaki. Tercatat ada 730 titik BTT yang menjadi prioritas dan telah dilaksanakan pemantauan dan penertiban pada titik tersebut. Sebanyak ±180 personil dilibatkan setiap harinya dalam pelaksanaan BTT tersebut. Jumlah personil tersebut berasal dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi, Unsur TNI/Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air dan Dinas Perhubungan. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan Bulan Tertib Trotoar tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.15
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Tim Terpadu Bulan Tertib Trotoar Tahun 2017

NO	WILAYAH	HASIL				JUMLAH
		PKL	KENDARAAN PELANGGAR TROTOAR		LAIN-LAIN	
			MELINTAS	PARKIR		
1	AGUSTUS	1.900	953	4.904	3.551	11.308
2	SEPTEMBER	1.084	177	2.400	2.887	6.548
3	OKTOBER	1.023	152	2.644	3.396	7.215
4	NOVEMBER	1.095	157	2.443	2.744	6.439

5	DESEMBER	1.265	203	1.511	2.044	5.023
	JUMLAH TOTAL	6.367	1.642	13.902	14.622	36.533

Sumber : Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan jumlah pelanggaran terhadap fungsi trotoar yang semula pada bulan Agustus 2017 sebanyak 11.308 pelanggaran kemudian menurun pada bulan Desember 2017 menjadi 5.023 pelanggaran. Hal ini mengindikasikan Kegiatan Bulan Tertib Trotoar yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup efektif dalam menekan jumlah pelanggaran yang terjadi.

Tabel 6.16
Jumlah Titik Prioritas Penertiban Bulan Tertib
Trotoar Tahun 2017

BULAN	JAKARTA PUSAT	JAKARTA UTARA	JAKARTA BARAT	JAKARTA SELATAN	JAKARTA TIMUR	TOTAL
AGUSTUS	31	31	31	31	31	155
SEPTEMBER	23	23	23	23	23	115
OKTOBER	31	31	31	31	31	155
NOVEMBER	30	30	30	30	30	150
DESEMBER	31	31	31	31	31	155
TOTAL	146	146	146	146	146	730

Sumber : Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, 2017

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan Penanggung Jawab Utama Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Hal Ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan SKPD terkait. Adapun SKPD terkait yang dimaksud adalah SKPD yang tugas dan fungsinya menjadi objek Sepuluh (10) Tertib yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta saat ini berjumlah 3.232 orang PNS/CPNS serta tenaga tambahan sebanyak 1.638 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sebagian besar pegawai berpendidikan SLTA dengan mayoritas pangkat/golongan ruang II/c. Bila dilihat dari jumlah personil Satpol PP yang berstatus PNS/CPNS dan jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.374.200 jiwa, maka perbandingan petugas dengan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yaitu **15,58** Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berbanding 50.000 penduduk.

Tabel 6.17
Rekapitulasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan		
	• Golongan IV	35	
	• Golongan III	531	
	• Golongan II	2.586	
	• Golongan I	80	
B.	Eselon		
	• Eselon II	2	
	• Eselon III	12	
	• Eselon IV	87	
C.	• Fungsional	2	
D.	• Staf	3.129	
E.	• PTT	1.638	

sumber : Satpol PP Prov. DKI Jakarta, 2015

3. Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Tramtibum dan Kendala

a. Kegiatan Penanggulangan Tramtibum

Penanganan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terus ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai program-program sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kinerja ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional;
 - Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha
 - Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam Kegiatan Penertiban Tempat Usaha Hiburan Pada Hari-hari Besar Keagamaan

- Penindakan Penyegehan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan (Perda 15 Tahun 2011 dan Perda 10 Tahun 2004)
 - Pelaksanaan Piket Posko Operator 29
 - Penyelenggaraan Penertiban dan Pengamanan Pasca Penertiban bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
 - Pelaksanaan Piket Monitoring Trantibum 1x24 Jam Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
 - Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru 2018
 - Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada Jalan Protokol dan Fasilitas Umum
 - Pemantauan Daerah Rawan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Pemusnahan Minuman Beralkohol Hasil Penertiban
 - Pengawasan Penertiban Pelaksanaan HBKB
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Tempat Usaha Berdasarkan UUG
 - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat di Lingkar Luar Kawasan Monas
 - Penyediaan Kendaraan Tahanan
- 2) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan
- Diklat Pembentukan Pol PP Tingkat Dasar Pola 150 Jam
- 3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
- Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI)
 - Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
 - Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Biaya Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
 - Biaya Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (OP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)
 - Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
 - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Alat Pendukung Pelaksanaan Penertiban
- 4) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
 - Penyediaan Ban dan Aki Kendaraan Dinas Operasional

b. Kendala Penanggulangan Tramtibum

Kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain :

1) Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam Penanggulangan Tramtibum adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat pelaku usaha untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat pelaku usaha yang dimaksud adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan; pemilik usaha yang tidak memiliki atau belum mengurus izin usaha dan memiliki usaha di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Provinsi DKI Jakarta.

2) Kendala Internal

Keterbatasan jumlah petugas di lapangan baik dari Satpol PP sendiri maupun dari aparat keamanan yang berasal dari unsur masyarakat seperti Satlinmas/Hansip membuat penyelenggaraan Tramtibum menjadi kurang optimal. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD terkait yang tugas pokok dan fungsinya bersinggungan langsung dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, misalnya dalam hal pengawasan dan penertiban tempat usaha. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Ketertiban Umum

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta selalu bermitra dengan aparat keamanan lain seperti Kepolisian dan TNI. Tujuan keterlibatan aparat Kepolisian dan TNI dalam hal pengawasan dan penertiban adalah untuk memberi dukungan pengamanan kegiatan dari hal-hal di luar perkiraan yang dapat membahayakan dan merugikan petugas penertiban maupun masyarakat. Sekitar ± 9000 personil TNI/Polri dilibatkan dalam penyelenggaraan

Tramtibum tahun 2017. Beberapa kegiatan yang melibatkan Kepolisian dan TNI diantaranya:

- a. Pengawasan dan pengendalian tempat usaha
- b. Pelaksanaan tim terpadu dalam kegiatan penertiban tempat usaha hiburan pada hari-hari besar keagamaan
- c. Penindakan dan penyegelan tempat usaha yang melanggar ketentuan
- d. Penyelenggaraan penertiban dan pengamanan pasca penertiban bagi pelanggar peraturan daerah dan peraturan lainnya
- e. Pengawasan dan penertiban media informasi dan promosi pada jalan protokol dan fasilitas umum

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 907.835.830.418,-

Tabel 6.18
Anggaran Satpol PP

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SATPOL PP	907.835.830.418	838.334.101.222	92%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	714.793.099.620	683.357.459.889	96%
2. BELANJA LANGSUNG	193.042.730.798	154.976.641.333	80%
a. Belanja Pegawai	143.664.812.708	134.187.858.639	93%
b. Belanja Barang dan Jasa	49.004.207.390	20.521.141.344	42%
c. Belanja Modal	373.710.700	267.641.350	72%

Sumber : Satpol PP Prov. DKI Jakarta 2017